



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KESEHATAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN**
JL. A. WAHAB SYAHRANIE NO. 16 KOTAK POS NO. 1064 TELP. 0541-743908 FAX. 743810
SAMARINDA



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - BAB IV. Tujuan dan Sasaran;
 - BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 - BAB VII. serta Pendanaan;
 - BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - Penutup.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

- a. pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

- b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

**RANCANGAN AKHIR
RENSTRA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2024-2026, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional dan sasaran Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sustainable Development Goals (SDG's).

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Besar harapan kami dengan perencanaan strategis ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota maupun pihak-pihak lain yang memerlukan dalam rangka penyusunan perencanaan dan sebagai dasar pengambilan keputusan serta kebijakan khususnya dibidang kesehatan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga tersusunnya dokumen ini.

Masukan dan saran kami harapkan dalam penyempurnaan dokumen ini, semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam penentuan arah dan kebijakan dalam bidang Kesehatan.

Samarinda, 22 Mei 2023

Kepala Dinas,



Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ.,M.Kes.,MARS
Pembina Tingkat I
NIP. 19710720 200604 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1.LATAR BELAKANG	6
1.2.LANDASAN HUKUM	9
1.3.MAKSUD DAN TUJUAN	12
1.4.SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	15
2.1.TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN.....	15
2.2.SUMBERDAYA DINAS KESEHATAN.....	26
2.3.KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	30
2.4.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD.....	161
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	164
3.1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	164
3.2.PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	181
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	185
4.1.TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	185
4.2.CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH	193
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	196
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	202
6.1.RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	202
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	220
BAB VIII PENUTUP	224

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN..... 26

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 DATA PNS BERDASARKAN KLASIFIKASI PENDIDIKAN	27
TABEL 2.2 DATA PNS BERDASARKAN KLASIFIKASI GOLONGAN RUANG	28
TABEL 2.3 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA.....	29
TABEL 2.4 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN	32
TABEL 2.5 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	144
TABEL 2.6 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	156
TABEL 2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENGELUARAN	160
TABEL 2.8 FASILITAS DAN PELAYANAN KESEHATAN	162
TABEL 3.1 PEMETAAN PERMASALAHAN DINAS KESEHATAN	166
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN	186
TABEL 4.2 INDIKATOR SASARAN DAN STRATEGIS RPJMN 2020-2024	189
TABEL 5.1 TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN	197
TABEL 6.1 PENDANAAN DINAS KESEHATAN 2024-2026	204
TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN	220
TABEL 7.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS KESEHATAN	221

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru serta memerintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan norma standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Selain itu penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota agar memperhatikan :

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022.
- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu Strategis yang berkembang;
- e. Kebijakan Nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan masukan dari pemangku kepentingan/stakeholders.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan program-program kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Kalimantan Timur dengan masyarakat yang sehat sejahtera, merata dan berkeadilan.

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kesehatan telah menyusun rencana strategis di bidang kesehatan sebagai kerangka perencanaan pembangunan daerah.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai arah dan acuan sekaligus kesepakatan bagi seluruh komponen Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang disepakati bersama. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mensinergikan terhadap Renstra Kementerian Kesehatan RI guna meningkatkan pembangunan kesehatan nasional dan sinergitas koordinasi terhadap Renstra Dinas Kesehatan 10 Kabupaten/Kota melalui program-program kesehatan dan merupakan satu kesatuan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Penyusunannya dilakukan melalui satu proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan-balik yang terorganisasi dan sistematis. Dokumen ini merupakan pedoman seluruh upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya dan para pelaku pembangunan kesehatan dalam lingkup wilayah kerjanya yang bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan satu pola tindak. Renstra ini juga digunakan sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Sesuai dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi, terdapat pembagian peran dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bertekad mengembangkan sumber daya manusia yang diarahkan kepada kemandirian dan kemampuan daya saing global melalui peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan kesehatan, pembangunan ketenagaan/aparatur, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan pengembangan wilayah potensial.

Dengan memperhatikan berbagai kebijakan-kebijakan baik yang bersifat nasional maupun global, maka untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan, perlu adanya kejelasan tentang kondisi pembangunan kesehatan dewasa ini dan kecenderungannya, serta adanya acuan pembangunan jangka panjang bidang kesehatan yang lebih jelas dan spesifik.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut, dalam tiga dekade ini, telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Namun demikian derajat kesehatan di Indonesia masih terhitung rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Padahal kesehatan merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks*).

Permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk yang antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi, anak balita, dan ibu maternal, serta tingginya proporsi balita yang menderita gizi kurang; masih tingginya

angka kematian akibat penyakit menular serta kecenderungan semakin meningkatnya penyakit tidak menular, kesenjangan kualitas kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah/daerah, gender, dan antar kelompok status sosial ekonomi; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi, dan mutu tenaga kesehatan, serta terbatasnya sumber pembiayaan kesehatan dan belum optimalnya alokasi pembiayaan kesehatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 diantaranya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Menjaga kesinambungan pembangunan bidang kesehatan menjelang Pilkada Serentak Tahun 2024;
2. Sebagai arah pembangunan jangka menengah bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2024-2026; dan
3. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang Kesehatan di daerah Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2024-2026.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2024-2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2024-2026;

3. Menjadi pedoman penyusunan program/kegiatan/subkegiatan beserta target dan pagu yang bersifat indikatif dalam penyusunan APBD.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika penyajian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bab II paling sedikit memuat:

1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi;
2. Sumber Daya;
3. Kinerja Pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
4. Kelompok Sasaran Layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab III paling sedikit memuat:

1. Permasalahan Pelayanan;
2. Isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Tujuan dan Sasaran tahun 2024-2026;
2. Cascading Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome, Output, serta Indikatornya masing-masing).

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN & SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

Bab VII paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Penentuan target kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tugas Dinas Kesehatan sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas kesehatan bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kesehatan.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN

2.1.1. Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas membantu Gubernur Kalimantan Timur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

2.1.2. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

a. Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan bidang kesehatan.

b. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- 4) Pengelolaan Asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;

Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Perencanaan Program

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

b) Sub Bagian Keuangan

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

c) Sub Bagian Umum

Tugas :

Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

c. Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

- pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:

- a) Seksi Kesehatan Keluarga

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga

- b) Seksi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan.

- c) Seksi Gizi, Kesehatan Kerja, dan Olah Raga

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Gizi, kesehatan kerjadan olah raga

d. Tugas dan Fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA.
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA.
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA.

- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:

- a) Seksi Surveilans dan Imunisasi

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans, imunisasi serta kesehatan haji dan krisis kesehatan

- b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

- c) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa dan NAPZA

- e. Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera, Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN.

Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera, Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera, Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera, Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Kesehatan Matra, Indera,

Laboratorium, melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan JKN

c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional, Matra, Indera dan Laboratorium.

f. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- 3) Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:

a) Seksi Kefarmasian

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

b) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat

kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas :

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

(1) Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas :

- a. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
- b. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)
- c. RS. Mata
- d. RSUD. KORPRI

(2) Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah susunan struktur organisasi yang akan melaksanakan tugas-tugas pokok kedinasan. Susunan kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah sbb:

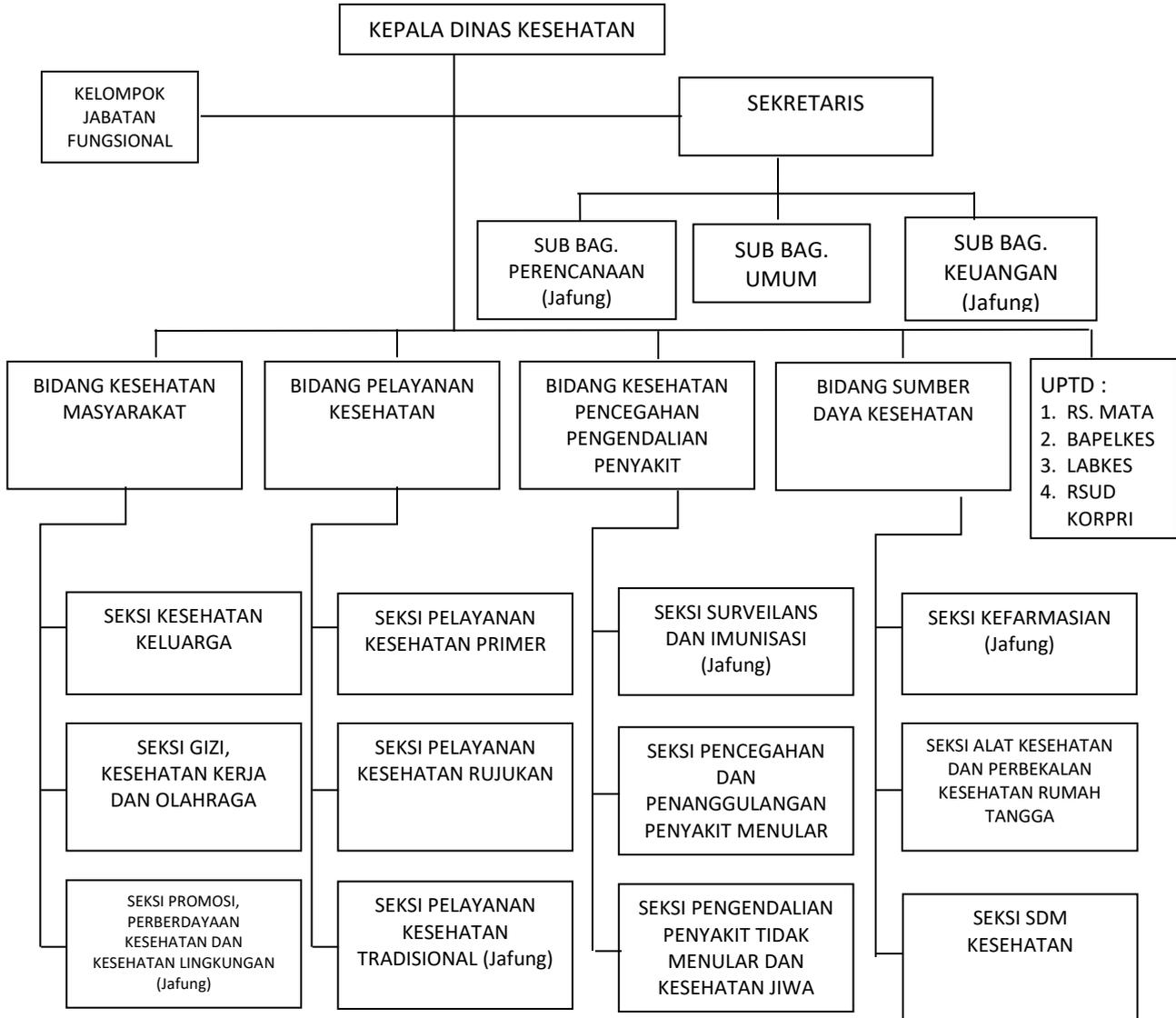
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan Program (Jafung);
- b. Sub Bagian Keuangan (Jafung);

- c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pelayanan Kesehatan;
Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional (Jafung)
 4. Bidang Sumber Daya Kesehatan meliputi;
 - a. Seksi Sumber Daya Masyarakat Kesehatan
 - b. Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
 - c. Seksi Kefarmasian (Jafung)
 5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ;
terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - c. Seksi Surveilans dan Imunisasi (Jafung)
 6. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - b. Seksi Gizi, Kesehatan Kerja & Olahraga
 - c. Seksi Promosi, Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan (Jafung)
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) meliputi:
 - a. UPTD Laboratorium Kesehatan
 - b. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan
 - c. UPTD RS. Mata
 - d. UPTD RSUD. KORPRI

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur



2.2. SUMBER DAYA DINAS KESEHATAN

A. Data Ketenagaan

Tenaga kesehatan merupakan pendukung utama dalam pembangunan kesehatan. Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seharusnya sesuai dengan kebutuhan. Komposisi pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur beserta unit pelaksanaan teknis daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan dengan Jenis Kelamin Per 31 Desember 2021

No	Pendidikan	Dinkes		Bapelkes		Labkes		RS. Mata		RS. KORPRI		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	SD	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
2.	SLTP	3	0	1	0	2	1	0	0	0	0	7
3.	SLTA	18	2	9	1	1	0	3	1	1	0	36
4.	D1	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	7
5.	D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	D3	1	1	0	0	6	4	2	11	2	1	28
7.	D4	0	1	0	0	1	3	1	1	0	2	9
8.	S1	18	14	3	3	2	5	2	3	0	6	56
9.	S2	5	11	3	6	2	1	2	1	0	2	33
10	S3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.												
	Jumlah	50	30	19	10	14	14	10	17	3	11	178

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari data pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD berdasarkan Klasifikasi Pendidikan terhadap jenis kelamin sebagian besar adalah berpendidikan S1 (56 orang/31%) yang terbagi atas jenis kelamin laki-laki (25 orang/44%) dan perempuan (31 orang/56%) dan yang paling sedikit berpendidikan SD (2 Orang/1%) yang semuanya berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Golongan Ruang
Per 31 Desember 2021

No	Unit Kerja	Golongan Kepegawaian				Jumlah
		IV	III	II	I	
I	Dinas Kesehatan					
1	Sekretariat	3	10	8	1	22
2	Bidang Kesmas	5	10	1	1	17
3	Bidang P2P	2	10	3	0	15
4	Bidang Yankes	2	6	2	0	10
5	Bidang SDK	2	12	1	1	16
II	UPTD					
6	Bapelkes	6	11	10	2	29
7	Labkes	4	17	4	3	28
8	RS. Mata	2	23	2	0	27
9	RS. KORPRI	2	10	2	0	14
Jumlah		28	109	33	8	178

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari data pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD berdasarkan golongan dan ruang sebagian besar adalah golongan III yakni sebanyak 109 orang (61%) dan yang paling sedikit adalah golongan I yakni sebanyak 8 orang (4%).

B. Data Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan tujuan Dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi di dukung sarana dan prasarana yang tersedia sebagaimana sesuai dengan tabel :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN	UNIT
1	Tanah Kantor Dinkes Prov Kaltim	7.273 m ²
2	Luas Bangunan dan Gedung	3.950 m ²
3	Bangunan terdiri dari:	
	a. Gedung	4 Unit
	b. Mushola	1 Unit
	c. Gudang	2 Unit
	d. Aula	1 Unit
	e. Ruang Rapat	2 Unit
	f. Tempat Parkir Roda 2	1 Unit
4	Alat Angkutan:	
	a. Kendaraan Roda 4	14 Unit
	b. Kendaraan Roda 2	5 Unit

Sumber: Data Inventaris Barang Dinas Kesehatan Prov.Kaltim 2022

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah tanah seluas 7.273 m² dan bangunan gedung kantor 3.950 m².

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah tanah seluas 7.273 m² dan bangunan gedung kantor 3.950 m².

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terletak di Jalan Abdul Wahab Syahrani No. 16, Kotak Pos No. 1064 Telp. 0541-743908 Fax. 743810-733427 Samarinda dan alamat UPTD yaitu :

1. RS. Mata Samarinda yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Samarinda.
2. UPTD. Balai Pelatihan Kesehatan yang terletak di Jalan Wolter Mangonsidi Samarinda.
3. UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan yang terletak di Jalan Achmad Dahlan di Samarinda.
4. UPTD RSUD KORPRI yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa di Samarinda.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian besar dalam kondisi baik dan beberapa dalam kondisi kurang baik, namun diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN PROVINSI KALTIM

Kinerja Pelayanan Kesehatan (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) yang akhirnya akan mempengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang didukung oleh tercapainya penduduk tumbuh seimbang pada suatu bangsa. Pencapaian sasaran tersebut ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk, meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara, meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan serta kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri bangsa.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur dalam 5 tahun (2019-2023) ini telah memberikan

kontribusi yang cukup bermakna dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur, meskipun ada beberapa yang masih belum memenuhi target serta memerlukan upaya keras dan berkesinambungan agar dapat lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Realisasi pencapaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 5 tahun terakhir.

2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pada bagian ini mengulas capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
PERMENDAGRI 18 TAHUN 2020								
	Dinas Kesehatan							
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan antenatal 4 kali (K4)	30	%	100	50	%	100
	Perbaikan Gizi Masyarakat	Jumlah kab/kota yang dibina untuk perbaikan gizi.	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang diperiksa kebugarannya	3050	Orang	1384	3100	Orang	3022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring evaluasi dalam melaksanakan SPM	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Persentase pembinaan Kab/Kota memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	20	%	40	40	%	60
	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang dibina untuk mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai	72	Fasyankes	72	150	Fasyankes	71

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		standar						
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yang mendapatkan izin kefarmasian	15	Sarana	15	19	Sarana	34
		Jumlah sarana produksi dan distribusi yang mendapatkan izin alat kesehatan	13	Sarana	22	16	Sarana	25
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Vaksin esensial di puskesmas	99	%	99,24	99	%	96,9

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan (buffer stok)	99	%	100	99	%	66
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas minimal terakreditasi utama	15	%	23,5	43	%	23,5
	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah puskesmas yang mendapatkan pendampingan akreditasi	28	Puskesmas	44	80	Puskesmas	55
	Peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah RSUD yang mendapatkan pembinaan dan	3	RSUD	3	7	RSUD	7

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	rujukan	pendampingan akreditasi SNARS edisi I						
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki Fasyankes telah mempersiapkan pelayanan Telemedicine	0	Kab/Kota	0	2	Kab/Kota	2
		Persentase KLB yang ditangani	100	%	100	100	%	100
		Persentase Kejadian Bencana yang ditangani	100	%	100	100	%	100
	Peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah kab kota yang telah melakukan pembinaan penyehat	6	Kab/Kota	6	7	Kab/Kota	7

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengembangan	tradisional						
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan RS UPTD sesuai standart	60	%	60	70	%	70
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah RS UPTD yang dipenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan	1	RS	1	2	RS	2
	Program pemeliharaan	persentase sarana prasarana dan alat	90	RS	90	100	RS	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	kesehatan RS UPTD yang layak pakai sesuai standar						
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah RS UPTD yang dipelihara sarana prasarana dan alat kesehatan	1	RS	1	2	RS	2
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase prasarana layanan yg menggunakan BLUD.	100	%	100	100	%	100
	Pelayanan dan Pendukung	Jumlah bulan pelaksanaan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pelayanan	pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD						
	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya	60	%	92	70	%	100
	Pendidikan dan pelatihan teknis Kesehatan	Jumlah tenaga yang mengikuti pelatihan bidang Kesehatan	600	Tenaga	463	660	Tenaga	296
	Standarisasi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah puskesmas daerah DTPK/3T yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	0	Puskesmas	0	25	Puskesmas	13

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Kab/Kota yang berhasil menurunkan kejadian penyakit menular	5	Kab/Kota	5	6	Kab/Kota	6
	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB untuk mencapai CDR \geq 70% dan SR \geq 90%	2	Kab/Kota	2	4	Kab/Kota	4
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV \geq	3	Kab/Kota	3	4	Kab/Kota	4

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		55%						
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar $\geq 95\%$	6	Kab/Kota	6	7	Kab/Kota	7
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	3	Kab/Kota	3	5	Kab/Kota	5
	Peningkatan surveillance	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan	7	Kab/Kota	10	8	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	epidemiologi dan penanggulangan wabah	pembinaan dalam pencapaian IDL						
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pencapaian persentase respon kewaspadaan kejadian luar biasa	8	Kab/Kota	10	9	Kab/Kota	10
		Persentase Kab/Kota yang melakukan persiapan pencegahan kejadian bencana	100	%	100	100	%	100
		Persentase Kab/Kota yang melakukan persiapan pencegahan	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		KLB						
	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah PD provinsi yang dilakukan pembinaan deteksi dini faktor resiko PTM dan implementasi KTR	3	PD Prov Kaltim	0	6	PD Prov Kaltim	35
		Persentase Kab/Kota yang melaksanakan implementasi KTR minimal di 50% sekolah	30	%	10	50	%	20
		Jumlah Kab/Kota yang mempunyai min 50% Puskesmas yang melaksanakan	2	Kab/Kota	2	3	Kab/Kota	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		pelayanan terpadu PTM (kasus Hipertensi & DM)						
		Jumlah Kab/Kota yang min 50% Puskesmasnya melaksanakan deteksi dini kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun	3	Kab/Kota	3	5	Kab/Kota	5
	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan	Persentase penduduk miskin dan tidak mampu yang mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan	95	%	95	97	%	97
	Kemitraan Bagi Pasien Tidak	Jumlah penduduk miskin dan tidak	132.000	Penduduk	132.000	132.000	Penduduk	132.000

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Mampu, Non BPJS	mampu yang mempunyai Jaminan Pelayanan Kesehatan						
		Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan program JKN menuju UHC	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Program Promosi Kesehatan dan Perberdayaan Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan min. 5 tema kampanye GERMAS	60	%	100	70	%	100
	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah kegiatan Penguatan OPD / Lintas Sektor yang mengimplementasikan kebijakan publik	3	Kegiatan	3	6	Kegiatan	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		berwawasan kesehatan						
		Jumlah penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran komunikasi pertahun	5	Saluran	5	5	Saluran	5
		Jumlah Kabupaten/ Kota yang dilakukan pembinaan dan penilaian (posyandu dan PHBS) dalam setahun	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
		Jumlah RS Pemerintah di Kalimantan Timur	10	RS	10	15	RS	15

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		yang dilakukan pembinaan PKRS						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	85	%	85	86	%	86
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	Unit	5	5	Unit	5
	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah unit kantor yang dilengkapi	5	Unit	5	5	Unit	5

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Kelengkapan Sarana dan Prasarana	sarana prasarana						
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	5	Unit	5	5	Unit	5
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	30	%	30	40	%	40
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta	60	Kegiatan	60	75	Kegiatan	75

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pemerintah Daerah	pengawasan kedalam daerah pertahun						
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	85	Kegiatan	85	90	Kegiatan	90
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	25	PNS	25	30	PNS	30
	Program Penyusunan Dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	67	%	67	68	%	68

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10	Dokumen	10	10	Dokumen	10
	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	10	Dokumen	10	10	Dokumen	10
	UPTD Balai Latihan Kesehatan							

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100	%	100	100	%	100
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	3	3	Unit	3
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana dan prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Prasarana							
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	100	%	100	100	%	100
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam	60	Kegiatan	60	75	Kegiatan	75

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Daerah	daerah pertahun						
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	85	Kegiatan	85	90	Kegiatan	90
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	10	PNS	10	10	PNS	10
	Program Standarisasi Pelayanan	Bapelkes terakreditasi	1	Unit	1	0	Unit	0

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Kesehatan							
	Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan penegndalian tenaga kesehatannya	55	%	55	100	%	100
	Pendidikan teknis Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	150	Tenaga	150	200	Tenaga	200
	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim							
	Program Pelayanan Administrasi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap	0	%	0	70	%	70

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Perkantoran	pelayanan PD (SKM)						
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	3	Unit	3	3	Unit	3
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan perlengkapan sarana prasarana tercukupi	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan perlengkapan sarana prasarana tercukupi	12	Bulan	12	12	Bulan	12
		Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	60	%	60	65	%	65

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	60	Kegiatan	60	75	Kegiatan	75
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	85	Kegiatan	85	90	Kegiatan	90
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang memenuhi klasifikasi, kompetensi dan	90	%	90	90	%	90

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		kinerja						
		Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	20	PNS	20	30	PNS	30
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan bahan habis pakai yang tersedia	100	%	100	100	%	100
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Buffer stok obat dan bahan pakai habis tersedia	100	%	100	100	%	100
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah	Unit pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM)	21	Unit	21	21	Unit	21

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata							
	Pembangunan Rumah Sakit	jumlah unit ruang/bangunan yang direhab/dibangun	0	Unit	0	1	Unit	1
	Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit	Jumlah unit sarana prasarana dan alat kesehatan yang diadakan	10	Unit	10	10	Unit	10
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah	persentase sarana prasarana dan alat kesehatan yang layak pakai sesuai standar	50	%	50	60	%	60

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	sakit paru-paru/ rumah sakit mata							
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit		10	Unit	10	10	Unit	10
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	Jumlah unit sarana prasarana dan alkes yang dipelihara	1	Unit	1	1	Unit	1
	Program Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit	Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal	21	Layanan	21	21	Layanan	21
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase capaian indikator standar pelayanan minimal rumah sakit	95	%	95	100	%	100
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan Tersedianya tenaga teknis BLUD	12	Bulan	12	12	Bulan	12
		Jumlah bulan tersedianya barang jasa BLUD	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	UPTD Laboratorium Kesehatan							
	Program Pelayanan	Tingkat kepuasan pemangku	100	%	82.29	100	%	88.3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Administrasi Perkantoran	kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)						
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100	Unit	100	100	Unit	100
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana dan prasarana	1	Unit	1	1	Unit	1
	Pemeliharaan	Jumlah unit kantor	1	Unit	1	1	Unit	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana						
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100	%	100	100	%	100
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	60	Kegiatan	60	75	Kegiatan	75
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan	85	Kegiatan	85	90	Kegiatan	90

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		konsultasi keluar daerah pertahun						
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (untuk tamu dan rapat)	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang memenuhi klasifikasi, kompetensi dan kinerja	90	%	90	90	%	90
		Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	20	PNS	20	30	PNS	30
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan bahan habis pakai yang tersedia	100	%	199	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Buffer stok obat dan bahan pakai habis tersedia	100	%	100	100	%	100
	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase terpenuhinya layanan BLUD sesuai standar	100	%	100	100	%	100
	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Jumlah bulan tersedianya barang dan jasa BLUD	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	UPTD RS. Korpri							
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	100	%	69.60	70	%	91.2
	Pelaksanaan Administrasi	Jumlah bulan pelaksanaan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Perkantoran	administrasi perkantoran						
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	100	%	81.64	100	%	92.33
	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana dan prasarana	59	Unit	56	23	Unit	21
	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah unit kantor yang dipelihara peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	52	Unit	28	44	Unit	40

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah	100	%	67.02	100	%	88.33
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaan serta pengawasan ke dalam daerah pertahun	83	Kegiatan	45	75	Kegiatan	74
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	85	Kegiatan	65	90	Kegiatan	85
		Jumlah bulan penyediaan makanan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		dan minuman (untuk tamu dan rapat)						
		Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan/Bimtek	40	OK	38	70	OK	66
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparat yang memenuhi klasifikasi, kompetensi dan kinerja	90	%	94.21	90	%	94.53
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan bahan habis pakai yang tersedia	82	%	0	84	%	82.11
	Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai Medis	Ketersediaan obat dan bahan habis pakai medis sesuai standar	82	%	0.27	84	%	82.11

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	0	-	0	100	%	0
	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kualitas layanan administrasi RS	0	-	0	100	%	59.35
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase standar RS terhadap pelayanan kesehatan	80	%	0	90	%	46

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah Gedung yang diadakan						
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	309	Unit	215	3	Unit	3
	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Jumlah bahan logistik RS/ Balai yang diadakan	0	-	0	100	Bahan	4
	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Alat kesehatan rumah sakit berfungsi dengan baik	100	%	34.16	100	%	84

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2019			2020		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Alat kesehatan, alat kantor dan gedung terpelihara	1	Paket	1	2	Paket	2

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019								
	Dinas Kesehatan							
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan SPM Bidang Kesehatan	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	MASYARAKAT							
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pkm yang memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	68	%	68	75	%	75
		Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	80	%	88	80	%	68
	Distribusi Alat Kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman Serta	Laporan Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman yang	2	Laporan	2	2	Laporan	2

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Fasilitas Kesehatan Lainnya	didistribusikan						
		Pembinaan Pengelolaan Obat & Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	10	Kab/Kot a	10	10	Kab/Kota	10
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Obat yang diadakan berdasarkan Kelas terapi	10	Kelas Terapi	10	10	Kelas Terapi	10
	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau,	Jumlah Kab yang melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine di	2	Kab	2	3	Kab	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pelayanan Kesehatan Berbasis telemedicine, dll)	DTPK						
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan, pengembangan penyediaan Fasyankes	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Pengadaan alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan sesuai standar	8	Unit	8	10	Unit	10
		Jumlah pemeliharaan alat	23	Unit	23	30	Unit	30

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan sesuai standar						
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara	10	Jenis	10	10	Jenis	10
	Pengembangan Unit Pemeliharaan Faskes Regional (RMC)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pengembangan Unit RMC	8	Kab/Kota	8	9	Kab/Kota	9
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Persentase Pelayanan Gizi yang tersedia pada Fasilitas Pelayanan	60	%	60	70	%	70

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Daerah Provinsi	Kesehatan sesuai standar						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendataan/Pembinaan/Monev/Pengawasan dan Pengendalian Gizi Masyarakat	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan fasilitasi perencanaan dan distribusi logistik gizi	6	Kab/Kota	6	10	Kab/Kota	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP	Persentase Pelayanan	60	%	20	70	%	60

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	kesehatan kerja dan olahraga pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar						
	Pengelolaan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pendataan/Pembin aan/Monev/Penga wasan dan Pengendalian Kesjaor	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
		Pengadaan logistik pemeriksaan kebugaran	6	Jenis	6	6	Jenis	6
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP	Persentase kabupaten/kota	60	%	60	70	%	70

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	yang melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sesuai dengan standart						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kabupaten/kota yang mampu mencapai pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali (K4) sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	7	7	Kab/Kota	7
		Kabupaten/kota yang mampu	6	Kab/Kota	8	7	Kab/Kota	8

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		mencapai Peralihan di faskes (PF) sesuai target yang telah ditentukan						
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Kunjungan nifas lengkap (KF3) sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	8	7	Kab/Kota	7
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Kunjungan neonatus lengkap	6	Kab/Kota	9	7	Kab/Kota	8

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		(KN Lengkap) sesuai target yang telah ditentukan						
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Pelayanan Kesehatan Bayi sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	7	7	Kab/Kota	9
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai Pelayanan Kesehatan Balita sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	4	7	Kab/Kota	8

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Kabupaten/kota yang mampu melakukan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	10	7	Kab/Kota	8
		Kabupaten/kota yang mampu melakukan pembinaan Sekolah/Madrasah sehat sesuai target yang telah ditentukan	6	Kab/Kota	10	7	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai dengan standart	30	%	30	40	%	40
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin	3	Kab/Kota	10	4	Kab/Kota	8

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		sesuai target yang telah ditentukan						
		Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan peserta KB Pasca Salin sesuai target yang telah ditentukan	3	Kab/Kota	8	4	Kab/Kota	7
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan	80	%	70	90	%	50

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		kesehatan lansia sesuai dengan standar						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Kabupaten/kota yang mampu mencapai cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar sesuai target yang telah ditentukan	8	Kab/Kota	7	9	Kab/Kota	5
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Program Pelayanan	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Daerah Provinsi	Kesehatan Lingkungan						
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Kab/kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan	10	Kab/Kota	6	10	Kab/Kota	8
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan SPGDT	30	%	30	50	%	50
	Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan pelaksanaan Sistem Penanganan Gawat Darurat	3	Kab/Kota	3	5	Kab/Kota	5

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Terpadu (SPGDT)						
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar	50	%	50	60	%	60
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP	Persentase Kab/Kota yang	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	melaksanakan Program Pelayanan Promosi Kesehatan						
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sosialisasi dan Advokasi Penerapan Kebijakan yang berwawasan kesehatan	3	Kab/Kota	3	3	Kab/Kota	3
		Pembinaan Posyandu Aktif ke kab/kota	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang mencapai UHC	6	Kab/Kota	6	7	Kab/Kota	9

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin atau tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan Kesehatan	90,000	Jiwa	88,707	100,000	Jiwa	73,712
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan	100	%	100	100	%	100
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan kegiatan pengelolaan data dan informasi	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Kesehatan						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan PHBS	3	Kab/Kota	3	3	Kab/Kota	3
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	20	%	20	40	%	40

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pembinaan/pemberdayaan/penggalangan kemitraan PSM & lintas sektor tingkat daerah provinsi	2	Kab/Kota	6	4	Kab/kota	10
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase saluran media yang digunakan untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PHBS	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penyebarluasan Informasi bidang kesehatan terkait Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui 5 saluran	5	Saluran	5	5	Saluran	5
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	0	0	0

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan tingkat daerah Provinsi	Persentase Faskes yang siap akreditasi minimal utama	44	%	41,71	60	%	53
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pelaksanaan upaya pelayanan Kesehatan	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Pkm yang dilakukan Visitasi dan/penilaian kelayakan sesuai standar	82	Pkm	78	113	Pkm	110

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS yang dilakukan pembinaan/visitasi	11	RS	32	11	RS	27
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jml RS Kelas B yang mempunyai ijin operasional yang masih berlaku	6	RS	6	6	RS	5
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan di Fasilitas Kesehatan sesuai standar	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat	90	%	99	92	%	96,54

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	MAKANAN MINUMAN	Esensial						
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang PAK yang mendapatkan Sertifikat Distribusi	100	%	100	100	%	100
	Penyediaan & pengelolaan data perizinan pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK berbasis elektronik	Laporan penyediaan dan pengelolaan data perizinan PBF Cabang & Cabang PAK berbasis elektronik	1	Laporan	1	1	Laporan	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan PAK	Jumlah PBF Cabang yang dilakukan pembinaan & pengawasan	20	Sarana	24	23	Sarana	25
		Jumlah Sarana cabang PAK yang dilakukan Pembinaan & Pengawasan	23	Sarana	23	26	Sarana	26
	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang mendapatkan Sertifikat Produksi UKOT	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Tradisional	Jumlah UKOT yang dilakukan pembinaan & pengawasan	2	Sarana	2	2	Sarana	2
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kab/Kota yang memiliki $\geq 45\%$ Puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatn	30	%	60	40	%	70
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pejabat Fungsional Kesehatan yang mengikuti uji kompetensi naik jenjang jabatan	150	orang	188	175	orang	670

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan bidang Kesehatan	156	Orang	30	180	Orang	-
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP & UKM Provinsi	Laporan Kegiatan Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP & UKM Provinsi	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Pemenuhan kebutuhan SDM	Binwasdal/Advokasi/ Sosialisasi /koordinasi/orientasi program SDM	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan layanan pencegahan & pengendalian Penyakit menular yang mencapai target nasional	40	%	100	60	%	100
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2HIV untuk mencapai persentase ODHA yang mendapatkan ARV \geq 55%	2	Kab/Kota	2	3	Kab/Kota	3

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 Malaria untuk mencapai persentase pengobatan Malaria Positif sesuai standar $\geq 95\%$	2	Kab/Kota	2	3	Kab/Kota	3
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2 DBD	1	Kab/Kota	1	2	Kab/Kota	2
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam program P2TB	1	Kab/Kota	1	2	Kab/Kota	2

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		untuk mencapai CDR \geq 70% dan SR \geq 90%						
	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal oleh Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan investigasi KIPI	4	Kab/Kota	4	4	Kab/Kota	4
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Kab/Kota yang berisiko KLB memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak	Jumlah Kab/Kota yang terdampak/ dan berisiko	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana	bencana melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar						
	Pengelolaan Surveilens Kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan SKDR	8	Kab/Kota	10	9	Kab/Kota	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang kesehatan lintas Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan capaian SPM Bidang Kesehatan	10	Laporan	10	10	Laporan	10
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Persentase kab/kota yang melaksanakan pelayanan P2PTM	30	%	100	40	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Daerah Provinsi							
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan untuk pelaksanaan Perda KTR no 5 th 2017 dan Deteksi Dini Faktor Resiko PTM	45	OPD	35	45	OPD	35
		Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program P2PTM (Posbindu, KTR, Pandu PTM & IVA-Sadanis)	10	Kab/Kota	10	10	Kab/Kota	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Kab/Kota yang dilakukan pembinaan masa tunggu program haji	10	Kab/Kota	9	10	Kab/Kota	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan program kesehatan jiwa	5	Kab/Kota	5	6	Kab/Kota	10
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dalam pelaksanaan IPWL Pecandu Narkotika	5	Kab/Kota	10	6	Kab/Kota	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Skor kepuasan masyarakat	80	%	84,71	82	%	86,9

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	terhadap urusan Bidang Kesehatan						
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	100	100	%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	10	Dokumen	10	10	Dokumen	10
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah dokumen evaluasi kinerja	10	Dokumen	10	10	Dokumen	10
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		administrasi keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang diverifikasi	1	Dokumen	1	1	Dokumen	1
		Jumlah bulan pelaksanaan Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun	1	Laporan	1	1	Laporan	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	SKPD							
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yangditanggapi	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	12	Laporan	12	12	Laporan	12
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan estimasi realisasi anggaran	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		administrasi kepegawaian Perangkat daerah						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	194	Orang	194	194	Orang	194
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	50	Pegawai	50	50	Pegawai	50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20	Jenis	20	20	Jenis	20
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12
		Jumlah unit kantor yang dilengkapi sarana prasarana	5	Unit	5	5	Unit	5
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	200000	Lembar	200000	200000	Lembar	200000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Bahan Bacaan dan	300	Exemplar	300	300	Exemplar	300

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Perundang-undangan	Peraturan Perundang- undangan						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman Rapat & Tamu	12	Bulan	12	12	Bulan	12
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah pertahun	90	Kali	90	90	Kali	90
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pembinaanserta	80	Kali	80	80	Kali	80

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		pengawasan ke dalam daerah pertahun						
		Jumlah bulan pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang diadakan	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	6	Unit	1	6	Unit	0

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang di Administrasikan	2000	Surat	2000	2000	Surat	2000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	95	Jenis	95	95	Jenis	95

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Jumlah Bulan pelaksanaan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12
		Jumlah Jasa pelayanan teknis & non teknis yang tersedia	1	Tahun	1	1	Tahun	1
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang dan Jasa Milik Daerah	1	Laporan	1	1	Laporan	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Bulan penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Lapangan							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	UPTD Balai Latihan Kesehatan							
	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase tenaga kesehatan yang	30	%	30	40	%	40

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	ditingkatkan kapasitasnya						
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	10	kali	10	15	kali	15
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100	orang	100	150	orang	150
	UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim							

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi pelayanan rumah sakit, 2. Presentase kelengkapan sarana prasaran dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit, 3. Presentasi sarana dan prasarana RS yang berfungsi sesuai standar, 4. Nilai standar pelayanan minimum rumah	84	%	84	86	%	86

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		sakit						
	Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Prosentase Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit	80	%	80	83	%	83
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarananya	1	Rumah Sakit	1	1	Rumah Sakit	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Bulan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Yang terpelihara	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana Fasilitas layanan Kesehatan	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan Penunjang Medis/Non Medis yang terpenuhi	5	Unit	5	15	Unit	15
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bulan terpeliharannya Unit bangunan RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		sesuai standart						
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bulan tersedianya obat dan BMHP	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	terlaksananya operasional Rumah Sakit	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Bulan pelaksanaan Operasional RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Terlaksananya Program Penunjang Urusan	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	DAERAH PROVINSI	Pemerintahan Daerah						
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Terhadap Target	100	%	100	100	%	100
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan belanja pelayanan dan pendukung pelayanan	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	%	100	100	%	100
	Penyediaan Administrasi	Jumlah Bulan Pelaksanaan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi RS						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan didalam rumah Sakit	20	kali	20	20	Kali	35
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	%	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	1	Kegiatan	1	1	Kegiatan	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Kantor	5	Unit	5	5	Unit	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Item Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	8	Item	8	8	Item	4
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan	10	exemplar	10	12	Exemplar	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat	10	kali	10	12	Kali	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daaerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah	100	%	100	100	%	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Unit Kendaraan Yang di adakan	1	Unit	1	1	Unit	2
	Pengadaan Mebel	Jumlah Item Mebel Yang Diadakan	3	Item	1	3	Item	88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang berfungsi baik dan layak beroperasi	7	Unit	7	9	Unit	4

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara;Jumlah Bahan Bakar Minyak (Pertalite) yang diadakan	2	Unit	2	1	Unit	14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara;Bahan Bakar Kendaraan Ambulance/Dexlite	4	Unit	0	7	Unit	1
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana RS yang berfungsi	100	%	100	100	%	100

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Daerah	dengan baik						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara rutin/berkala di RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpeliharanya sarana dan prasarana Unit kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Yang Di Pelihara	5	Item	5	6	Item	88

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Yang Mengalami Pemeliharaan	1	Unit	1	1	Unit	1
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya gaji non ASN	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	UPTD Laboratorium Kesehatan							
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi Laboratorium	100	%	0	100	%	95.27
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah bulan tersedianya Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar Laboratorium	12	Bulan	0	12	Bulan	12
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat	Jumlah Pengadaan alat	8	Unit	0	10	Unit	31

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan sesuai standar						
		Jumlah pemeliharaan alat kesehatan/peralatan laboratorium kesehatan sesuai standar	23	Unit	47	30	Unit	80
	UPTD RS. Korpri							
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi pelayanan rumah	85	%	73.97	90	%	70.84

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		sakit						
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelengkapan sarana prasarana dan alkes sesuai standar kelas rumah sakit / Capaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai kebutuhan/standart	80	%	87.99	100	%	70.79

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	jumlah fasilitas rumah sakit sesuai standar yang dibangun / Jumlah Pembangunan Gedung RS	1	Unit	0	1	Gedung	0
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	terpeliharanya fasilitas unit pelayanan kesehatan sesuai standar/ Jumlah Luasan terpeliharannya Unit bangunan RS	1	Unit	1	275	M2	259.98
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	tersedianya alat kesehatan dan penunjang /	3	Unit	3	23	Unit	20

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan dan Penunjang yang diadakan						
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	tercukupinya bahan pakai habis / Jumlah Jenis Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya yang tersedia	50	Jenis	40	10	Jenis	6
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	jumlah bulan pemeliharaan alat kesehatan dan alat penunjang / jumlah bulan Pemeliharaan/Kali	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		brasi Alat Kesehatan/Penunjang secara rutin/berkala						
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah bulan pemeliharaan sarana Fasilitas layanan kesehatan	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Bulan tersedianya obat dan BMHP				12	Bulan	5
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat	Terlaksananya operasional pelayanan Rumah Sakit / Capaian	100	%	54.26	100	%	54.26

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasional Rumah Sakit						
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	jumlah unit layanan yang tersedia sesuai standar / jumlah bulan pelaksanaan Operasional RS	21	Unit	11	12	Bulan	12
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya Alat/Perangkat SIK RS dan Jaringan Internet	1	Unit	22.83	1	Set	1
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat SIK RS dan Jaringan Internet yang	1	Unit	1	1	Set	1

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		disediakan / Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang diadakan						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Kesehatan	100	%	85.52	82	%	29.13

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Terhadap Target / Capaian pelaksanaan Pelayanan dan Pendukung pelayanan BLUD	100	%	14.66	100	%	29.13
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan dan pendukung pelayanan	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Rumah Sakit/Capaian	100	%	66.29	100	%	74.65

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		penyelenggaraan Administrasi Umum Rumah Sakit						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen listrik/penerangan / Jumlah Jenis penyediaan komponen listrik/penerangan	12	Bulan	12	24	Jenis	24
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor perunit bagian kerja di RS	100	%	93.59	7	Unit/Instala si	7

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		/ Jumlah Unit/Instalasi RS yang dilengkapi sarana dan prasarana						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedia cetak dan penggandaan RS	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Capaian Pengadaan Barang Milik	100	%	92.08	100	%	97.18

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Urusan Pemerintah Daerah	Daerah						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan	1	Unit	1	0	-	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan / Jumlah jenis Meubel yang diadakan	15	Unit	15	3	Jenis	3
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang berfungsi baik dan layak beroperasi / Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah secara	7	Unit	76.73	100	%	84.82

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		rutin/berkala						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional Yang Dipelihara	1	Unit	1	1	Unit	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional lapangan yang dipelihara	6	Unit	6	8	Unit	8
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemenuhan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya secara rutin/berkala						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Capaian Penyediaan Jasa Penunjang untuk penatausahaan Rumah Sakit 100 %	12	Bulan	12	100	%	87.77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Bulan penyediaan	12	Bulan	12	12	Bulan	12

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Daya Air dan Listrik	kebutuhan air, listrik, telepon dan internet						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya gaji non ASN	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan / Capaian Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Rumah Sakit	49	OK	30	100	%	61.25
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah pegawai mengikuti	40	OK	30	62	OK	38

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	pendidikan dan pelatihan						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi RS / Jumlah bulan Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN Rumah Sakit	12	Bulan	12	12	Bulan	12
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Persentase tenaga kesehatan yang ditingkatkan	80	%	57.81	85	%	82.85

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
	DAYA MANUSIA KESEHATAN	kapasitasnya						
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya SDM Kesehatan /Persentase SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, kompetensi dan kinerja	80	%	57.81	85	%	82.85
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah bulan tersedianya gaji SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi,	12	Bulan	12	10	orang	10

No	Program/ Kegiatan	Indikator Pogram/kegiatan	Target Kinerja dan Capaian Renstra					
			2021			2022		
			Target	Satuan	Capaian	Target	Satuan	Capaian
		kompetensi dan kinerja/ Jumlah SDM Kesehatan yang sesuai klasifikasi, Kompetensi dan kinerja						

2.3.2. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

**TABEL 2.5 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019 S.D 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019		2020		2021		2022	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya status kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Orang	90	79	85	92	80	168	75	73
		Jumlah Kematian Bayi	Orang	581	688	557	662	533	702	509	636
		Prevalensi Balita Stunting	%	30.08	28,01	29.56	28,1	26,5	22,8	26	23,9
2	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase Fasilitas Kesehatan Yang Terakreditasi	%	60	88,29	65	88,29	70	91,09	75	91,09
3	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulanga	Persentase pengobatan HIV dengan Anti Retroviral (ARV)	%	57	67,3	58	28,2	59	50	60	60,5

	n penyakit menular dan penyakit tidak menular	TBC/Case Detection Rate (CDR)Persentase Temuan kasus	%	50	54	55	27	60	36,07	65	51
		Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar	%	55	53,1	60	31,2	75	27,88	90	63,72
		Persentase Penderita Diabetes Milletus yang mendapat layanan sesuai standar	%	55	78,94	60	59,1	75	59,16	90	94,44

a. Status Kesehatan Ibu dan Anak

Sejak 3 tahun terakhir, tren jumlah kematian ibu pada tahun 2022 merupakan puncak jumlah penurunan kematian ibu yang terendah yaitu sebanyak 73 kematian ibu. Meskipun penyebab kematian masih di dominasi oleh pendarahan (21,9%) dan hipertensi (16,4%), namun penyebab kematian ibu yang disebabkan oleh covid19 hanya berkontribusi sebesar 4,1% apabila dibandingkan dengan tahun 2021 penyebab kematian ibu karena covid 19 merupakan penyebab utama (98%).

Jumlah kematian ibu di tahun 2022 tercapai sesuai dengan target yaitu sebanyak 73 kasus dari target 75 kasus. Terjadi penurunan jumlah kematian ibu di tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 43%, dikarenakan salah satunya adalah masa pandemi Covid-19 tahun 2021 dengan 168 kasus (50% penyebab kematian ibu adalah Covid 19).

Dalam 3 tahun terakhir, tren jumlah kasus kematian ibu tahun 2022 adalah yang terendah. Kabupaten dengan jumlah kematian ibu terbanyak adalah Kutai Kartanegara (24 kasus) diikuti dengan Kota Samarinda (13 kasus). Dan Kabupaten Mahulu dengan 0 kasus kematian. Bila berdasarkan wilayah kerja secara puskesmas, maka 39,7% kasus kematian terjadi di wilayah kerja puskesmas terpencil atau tidak di dalam perkotaan / dalam kota kabupaten. Sedangkan 60% nya lagi kasus kematian terjadi di wilayah kerja puskesmas yang terletak di dalam perkotaan atau dalam kota kabupaten dimana seharusnya akses mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan lebih mudah. Berdasarkan tempat meninggal ibu, 80,5% dari jumlah kematian ibu terjadi di RS dan masih terjadi kematian di perjalanan sebesar 12% serta di rumah ibu sebesar 11%. Penyebab kematian ibu secara langsung karena perdarahan dan preeklamsi (25%) dan 42% akibat lain seperti hipokalemi, TB tulang,

ARDS, dan emboli air ketuban. Masyarakat sudah cukup baik memilih persalinan di faskes (PF) 94,86% namun masih terjadi persalinan di dukun 12% dan persalinan yang ditolong oleh nakes (PN) namun tidak difaskes 14%. Berdasarkan umur ibu saat meninggal pada usia 20 - 34 tahun terbanyak (51,2%), usia lebih dari 35 th (41,9%) dan umur ibu dibawah 19 tahun (3,5%). Karena usia hamil terbanyak pada usia 20-35 tahun dan usia resiko tinggi saat hamil adalah lebih dari 35 tahun dan kurang dari 19 tahun. Penyebab kematian ibu dengan 3 terlambat : 1) terlambat identifikasi resiko pada ibu (K4 sudah memenuhi standar secara kuantitas yaitu 86% namun secara kualitas dianggap masih kurang karena kematian ibu masih cukup tinggi terjadi); 2) terlambat merujuk karena terlambat mengidentifikasi resiko dan komplikasi termasuk dalam kurangnya pemenuhan sapsras, akses sulit dan rujukan berputar; 3) terlambat mendapatkan pertolongan di faskes (terkait dengan kompetensi dan ketersediaan nakes dan obat-obatan) serta komunikasi dan koordinasi yang kurang terjalin antara FKTP dan FKRTL. Dan hal terpenting adalah tidak berjalannya dengan baik pelaksanaan AMP di beberapa kabupaten kota seperti Samarinda, Paser, Kutim, Kubar dan Mahulu. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penurunan kematian ibu antara lain : peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan ANC dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal melalui pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal serta keterlibatan Dokter dalam pelayanan ANC, peningkatan pelayanan ANC sesuai standar dengan kunjungan sebanyak 6 kali selama kehamilan dan diperiksa oleh dokter sebanyak 2 kali (1 kali di trimester I dan 1 kali di trimester III), penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal di setiap kabupaten kota, dan pemanfaatan Buku KIA dalam pelayanan ANC terpadu.

Begitu juga dengan kematian bayi, tren 5 tahun terakhir jumlah kematian bayi mengalami penurunan dimana pada tahun 2022

merupakan puncak terendah namun apabila dibandingkan dengan target yang diharapkan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Bayi dengan BBLR merupakan penyebab kematian bayi yang paling utama (25%) , Asfiksia (20%) dan penyakit infeksi (pneumonia diare dan penyakit infeksi lainnya) juga merupakan penyebab kematian bayi yang paling dominan (14%). Hal yang menjadi perhatian adalah meningkatkan kematian bayi karena kelainan kongenital sebesar 15%, untuk itu untuk menekan kematian karena kelainan kongenital diperlukan upaya yang lebih optimal untuk melakukan skrining Hiptiroid Kongenital (SHK) dan skrining penyakit jantung bawaan (PJB)

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) untuk melihat sejauh mana kinerja Pemerintah Provinsi dalam upaya percepatan penurunan Stunting di wilayah masing-masing. Dalam survei ini dilakukan pengukuran TB atau PB dan penimbangan BB yang nantinya akan menghasilkan data status gizi berdasarkan 3 (tiga) Indeks status gizi sesuai PMK No. 2 Tahun 2020, yaitu Underweight (BB Kurang) dinilai dari indeks BB/U, Stunting (Pendek) dinilai dari indeks TB/U atau PB/U dan Wasting (Gizi Kurang) dinilai dari indeks BB/TB atau BB/PB.

Berdasarkan data hasil SSGI yang sudah dilaunching bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-63 pada tanggal 25 Januari 2023 oleh Menteri Kesehatan RI menunjukkan hasil bahwa Provinsi Kalimantan Timur beserta 5 (lima) Provinsi lainnya mengalami kenaikan prevalensi, khususnya prevalensi stunting. Provinsi Kalimantan Timur sendiri mengalami kenaikan prevalensi di ketiga indeks status gizi dari tahun sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Tren Prevalensi Status Gizi di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan 3 (tiga) Indeks Status Gizi

Indeks Status Gizi	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan Prevalensi
Prevalensi Balita Underweight (BB Kurang)	16,2%	20,4%	 4,2%
Prevalensi Balita Stunting (Pendek)	22,8%	23,9%	 1,1%
Prevalensi Balita Wasting (Gizi Kurang)	8,1%	9,1%	 1%

Sumber data : Hasil SSGI (2021 dan 2022)

Dari hasil analisa korelasi, menunjukkan bahwa ada hubungan antara kenaikan prevalensi balita underweight dengan prevalensi balita stunting dan ada hubungan antara kenaikan prevalensi wasting dengan prevalensi stunting.

Hasil SSGI Kabupaten/Kota menunjukkan data yang beragam, dimana ada yang mengalami kenaikan pada 3 (tiga) indeks status gizi, ada yang hanya pada 2 (dua) indeks saja. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada tabel 2, tabel 3 dan tabel 4 dibawah ini.

Tabel 2. Tren Prevalensi Balita Underweight (BB Kurang) menurut Kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan Prevalensi
1	Paser	18,9	18,7	 0,2
2	Kutai Barat	12,7	17,9	 5,2
3	Kutai Kartanegara	17,5	25,1	 7,6
4	Kutai Timur	12	19,7	 7,7
5	Berau	19,8	18,4	 1,4
6	Penajam Paser Utara	15,9	20	 4,1

7	Mahakam Ulu	18,9	10	 8,9
8	Balikpapan	17,5	18,5	 1
9	Samarinda	13,9	20,7	 6,8
10	Bontang	21,2	15,2	 6

Sumber data : SSGI (2021 dan 2022)

Dari data pada tabel diatas, terdapat kenaikan prevalensi balita underweight (BB Kurang) dengan tingkat kenaikan tertinggi terjadi pada 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kab Kutai Barat dan Kab. Penajam Paser Utara.

Tabel 3. Tren Prevalensi Balita Stunting (Pendek) menurut Kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan Prevalensi
1	Paser	23,6	24,9	 1,3
2	Kutai Barat	15,8	23,1	 7,3
3	Kutai Kartanegara	26,4	27,1	 0,7
4	Kutai Timur	27,5	24,7	 2,8
5	Berau	25,7	21,6	 4,1
6	Penajam Paser Utara	27,3	21,8	 5,5
7	Mahakam Ulu	20,3	14,8	 5,5
8	Balikpapan	17,6	19,6	 2
9	Samarinda	21,6	25,3	 3,7
10	Bontang	26,3	21	 5,3

Sumber data : SSGI (2021 dan 2022)

Dari data pada tabel diatas, terdapat kenaikan prevalensi balita stunting (Pendek) dengan tingkat kenaikan tertinggi terjadi pada 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kab. Kutai Barat, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab. Paser dan Kab. Kutai Kartanegara.

Tabel 4. Tren Prevalensi Balita Wasting (Gizi Kurang) menurut Kabupaten/kota

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2021	Tahun 2022	Kenaikan Prevalensi
1	Paser	8,5	9,4	↑ 0,9
2	Kutai Barat	6	7,7	↑ 1,7
3	Kutai Kartanegara	9	9,4	↑ 0,4
4	Kutai Timur	7,6	7,3	↓ 0,3
5	Berau	9	9,4	↑ 0,4
6	Penajam Paser Utara	8,3	9,4	↑ 1,1
7	Mahakam Ulu	13,2	4,5	↓ 8,7
8	Balikpapan	10,4	10,2	↓ 0,2
9	Samarinda	6,1	9,3	↑ 3,2
10	Bontang	7,1	8,1	↑ 1

Sumber data : SSGI (2021 dan 2022)

Dari data pada tabel diatas, terdapat kenaikan prevalensi balita stunting (Pendek) dengan tingkat kenaikan tertinggi terjadi pada 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Samarinda, Kab. Kutai Barat, Kab. Penajam Paser Utara, Kota Bontang dan Kab. Paser.

Melihat ragam kenaikan maupun penurunan prevalensi status gizi menurut Kabupaten/Kota ini terdapat hal menarik dimana salah satu Kabupaten mengalami progres penurunan prevalensi status gizi pada 3 (tiga) indeks (Underweight, Stunting, dan Wasting) yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk 5 (lima) Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan pada setiap indeks status gizi akan mendapatkan pendampingan yang lebih intensif tanpa mengabaikan 5 (lima) Kabupaten/Kota lainnya. Salah satunya akan dilakukan monitoring khususnya terkait intervensi spesifik. Di tingkat Provinsi pun, nantinya Provinsi Kalimantan Timur akan masuk dalam 16 Provinsi Prioritas yang akan mendapat pendampingan intensif juga dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI, dimana salah satu kegiatan

yang rutin akan diikuti dari Provinsi adalah Weekly Meeting bersama Tim Kerja Stunting dan Tim Kerja lainnya yang terkait.

Selain menilai kinerja khususnya perbaikan masalah gizi (status gizi) melalui hasil survei yang nantinya digunakan sebagai bahan perencanaan dan kebijakan sesuai tingkatan (Nasional, Provinsi ataupun Kabupaten/Kota), terdapat juga penilaian kinerja melalui pelaporan secara rutin pada Aplikasi Sigizi Terpadu dimana tidak hanya melihat status gizi balita di wilayah tertentu tapi juga indikator lainnya baik indikator input, proses dan output. Data pada Aplikasi Sigizi Terpadu ini untuk mempercepat penemuan balita yang bermasalah gizi (deteksi dini, sehingga akan mempercepat tindaklanjut dan bisa segera dilakukan tatalaksana/intervensi sesuai permasalahan yang sudah ditegakkan diagnosanya. Dalam Aplikasi Sigizi Terpadu pada modul e-PPGBM yang memuat data individu balita by name by address menunjukkan hasil bahwa rerata balita yang ditimbang (D/S) hanya sebesar 39,81%. Apabila melihat data hasil penimbangan dan pengukuran yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2022 hanya sebesar 44,32% (124.441 balita dari 280.749 balita yang sudah ada datanya dalam Aplikasi Sigizi Terpadu). Dari hasil tersebut sudah ditemukan balita yang mengalami underweight sebesar 12,58%, balita stunting 13,48% dan balita wasting sebesar 7,52%.

Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk membawa balitanya dipantau pertumbuhannya secara rutin, memerlukan dukungan dari lintas sektor dan jejaringnya masing-masing. Kita ketahui bersama dalam mengatasi masalah gizi khususnya stunting tidak hanya menjadi tugas utama bidang kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan baik Provinsi maupun Kab/Kota dalam melakukan intervensi spesifik (30%), namun perlu keterlibatan lintas sektor dalam melakukan intervensi sensitif (70%) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas

Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Akademisi.

Untuk mempercepat pencapaian target diperlukan peran serta semua sektor sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing. Salah satunya dengan meningkatkan pemantauan pertumbuhan hingga mencapai 80% bahkan 100% dari seluruh sasaran balita yang ada di wilayah kerja masing-masing sehingga balita yang bermasalah gizi bisa langsung ditatalaksana sesuai standart/juknis yang telah ditetapkan.

b. Akses dan Mutu pelayanan kesehatan

Persentase Fasilitas Kesehatan Yang terakreditasi, Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sampai akhir Desember 2022 adalah 182 Puskesmas (96,81%) dari total 188 Puskesmas yang terdiri dari : 34 Puskesmas terakreditasi dasar, 104 Puskesmas terakreditasi madya, 38 Puskesmas terakreditasi utama, dan 6 Puskesmas terakreditasi paripurna. Adapun masih ada 6 Puskesmas yang belum terakreditasi. Capaian Puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 182 Puskesmas (96,81%) melebihi target yaitu 70%, hal ini dikarenakan adanya upaya dari puskesmas untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi proses akreditasi, adanya kegiatan pendampingan akreditasi Puskesmas baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur serta adanya dukungan anggaran untuk kegiatan akreditasi Puskesmas melalui anggaran dari DAK non fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan jumlah Rumah Sakit yang ada di Kalimantan Timur sampai dengan bulan Desember 2022 terdapat 59 (lima puluh sembilan) RS, RS yang telah terakreditasi sebanyak 43 (empat puluh tiga) RS atau sekitar 72.88 %. Berikut uraian berdasarkan tingkat kelulusan akreditasi RS, yaitu tingkat paripurna

sebanyak 18 RS, tingkat utama sebanyak 4 RS, tingkat madya sebanyak 8 RS, tingkat dasar sebanyak 3 RS dan tingkat Perdana sebanyak 10 RS. Dimasa pandemik Covid-19, untuk mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari risiko tertular Covid-19 maka survei akreditasi pada tahun 2021 ditiadakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang perizinan, akreditasi fasilitas kesehatan dan penetapan RS Pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Kegiatan persiapan dan survei akreditasi untuk rumah sakit akan dimulai setelah status bencana nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.

c. Upaya Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Pada saat pandemi covid-19, capaian menurun karena pasien takut periksa dan mengambil obat di fasyankes. Tahun 2022 setelah pandemi covid-19 mereda, capaian program kembali meningkat. Fasyankes yang dapat memberikan obat ARV juga bertambah setelah mendapat pelatihan. Dan dukungan komunitas atau penjangkau lapangan untuk menemukan penderita baru dan memulai pengobatan dengan ARV semakin meningkat

Pada saat pandemi covid-19, capaian menurun karena pasien takut periksa dan mengambil obat di fasyankes. Tahun 2022 setelah pandemi covid-19 mereda, capaian program kembali meningkat. Klinik-klinik swasta dilakukan kerjasama sehingga dapat memberikan pelayanan TB, meningkatkan peran organisasi profesi, kegiatan penyisiran kasus TB di RS sehingga kasus TB yang belum dilaporkan dapat dimasukkan ke dalam SITB.

Capaian Tahun 2022 sebesar 63,72 %, dan masih dibawah target sebesar 90 %. Dari 10 Kabupaten Kota capaian SPM Hipertensi yang mencapai target ada 2 kab yaitu Kukar dan PPU. Adapun Kab/Kota yang memiliki Capaian dibawah 50% ada 3 kab/kota yaitu

Kota Bontang, Kab Paser dan Kab Berau. Hal ini dikarenakan masih mengalami situasi pandemi covid-19 di awal tahun 2022 hingga pertengahan tahun, dimana jumlah kunjungan rendah baik ke faskes ataupun ke Posbindu/Posyandu. Kunjungan mulai naik pada akhir tahun.

d. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 secara teknis dibuat dan disusun melalui analisis terhadap hal yang dijadikan standar pengukuran, yaitu pengukuran kegiatan kinerja dan pengukuran pencapaian sasaran serta akuntabilitas keuangan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2019-2023.

Pembandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021 yaitu dengan membandingkan capaian kinerja pada Tahun 2020.

Tabel. 2.6 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,9	24,9
2	Pengukuran Kinerja	25%	18,44	18,75
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,68	12,68
4	Evaluasi Kinerja	10%	6,91	6,91
5	Capaian Kinerja	20%	7,41	7,5
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	70,33	70,73
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: Lakip 2022

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana terlihat pada Tabel 2.7 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Penilaian implementasi SAKIP pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kategori “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik” (akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, rencana aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara periodik, mekanisme pengumpulan data kinerja sudah ada dan informasi kinerja pada dasarnya telah dimanfaatkan dalam upaya perbaikan kinerjanya). Hal ini menjadikan kemajuan bagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan kebijakan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat lebih ditingkatkan lagi.

Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam perencanaan kinerja Dinas Kesehatan perlu ditambahkan :
 - Tujuan & Indikator kinerja tujuan dalam Renstra dilengkapi dengan target keberhasilan.
 - Dokumen Renstra diselaraskan dengan RPD
 - Target Jangka Menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.
 - Reviu Renstra agar menunjukkan perubahan yang signifikan dan reviu berkala.
 - Rencana Aksi atas kinerja mencantumkan target secara periodik atas kinerja.
 - Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan.
 - Rencana Aksi atas kinerja agar dilakukan monitor pencapaiannya secara berkala.
 - Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
- b. Pengukuran Kinerja

- Menyusun indikator kinerja eselon III & IV yang memenuhi indikator yang baik.
 - Pengukuran Kinerja agar dilakukan secara berjenjang
 - Pengumpulan data kinerja agar dapat diandalkan dimana data dapat lebih mudah ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan & anggaran
 - Hasil Pengukuran (Capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas agar dapat dimanfaatkan sebagai dasar pemberian Reward & Punishment.
 - Melakukan Reviu secara berkala.
- c. Pelaporan Kinerja
- Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
 - Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan penganggaran.
 - Informasi yang disajikan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja.
- d. Evaluasi Internal
- Pemantauan Rencana Aksi memberikan alternative perbaikan yang dapat dilaksanakan.
 - Hasil evaluasi menunjukkan perbaikan setiap periode dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata untuk perbaikan pelaksanaan program.
- e. Pencapaian Kinerja
- Penetapan Kinerja disesuaikan dengan anggaran yang diterima.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Perencanaan anggaran harus dirumuskan sedemikian rupa agar dalam pendanaan program kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efisien dalam artian terjadi keseimbangan antara pengeluaran biaya dengan upaya pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan, tabel dibawah ini menunjukkan gambaran pendanaan program kegiatan Dinas Kesehatan

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. (*Terlampir Realisasi Anggaran*).

Tabel. 2.7 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran

Uraian	Anggaran pada tahun Ke					Realisasi pada tahun ke				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Langsung	106.715.699.000	108.296.652.315	159.506.618.806	152.787.849.584	294.077.419.466	52.492.987.143	87.187.570.108	131.918.692.919	126.718.478.696	-
Belanja tidak Langsung	32.852.611.350	31.623.445.000	36.438.671.000	37.960.001.501	62.515.562.837	25.696.475.100	27.355.120.188	32.571.114.183	31.520.244.625	-
Lain-Lain PAD yang Sah	15.290.136.350	13.346.741.268	39.495.417.806	27.331.822.409	13.500.000.000	7.623.201.482	8.474.799.290	31.738.554.896	19.621.841.117	-
Total	154.858.446.700	153.266.838.583	235.440.707.612	218.079.673.494	370.092.982.303	85.812.663.725	123.017.489.586	196.228.361.998	177.860.564.438	-

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap potensi tantangan dan peluang dalam pembangunan kesehatan di Kalimantan Timur guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut :

a. Tantangan meliputi :

1. Sebagian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang tinggal di kawasan perbatasan, pedesaan, daerah pedalaman, daerah tertinggal dan pulau terdepan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat termasuk pangan dan gizi, layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, sumber daya alam dan lingkungan, pembalakan hutan, kerusakan lingkungan, percepatan pembangunan jaringan prasarana dan sarana, serta perluasan akses informasi dan partisipasi dalam pembangunan.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan yang belum merata.
3. Kriminilitas yang semakin meningkat
4. Peredaran NAPZA yang semakin meningkat
5. Gaya hidup yang tidak sehat meningkat
6. Saat ini bidang Kesehatan merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan beban paling berat dalam menangani dampak akibat pandemi Covid-19, dimana perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di masyarakat. Untuk menanggulangi dampak Covid-19, perlu adanya reformasi di bidang kesehatan yang ditekankan pada pengendalian penyebaran penyakit menular, pelayanan kesehatan dan surveilans. Sehingga pasca Covid-19 akan difokuskan kepada Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat, penanganan penyakit menular, ketersediaan alat kesehatan, kesiapan sarana dan prasarana kesehatan serta masyarakat keluarga miskin yang terdampak penyakit menular. Berikut fasilitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2.8
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No.	Fasilitas Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit	53	57	60	59	58
2	Tempat Tidur RS	6080	6541	7580	6820	6903
3	Rumah Sakit Swasta	23	31	33	30	29
4	Dokter Umum	941	1224	2161	2079	2034
5	Dokter Gigi	277	280	415	438	433
6	Dokter Spesialis	597	694	815	805	803
7	Tenaga Medis RS	114	1481	1776	2614	1874
8	Perawat RS	3941	5981	6894	6962	7059
9	RS Bersalin	11	9	9	8	8
10	Puskesmas	187	187	188	188	188
11	Pustu	724	732	699		
12	Dokter Puskesmas	409	498	539	537	519
13	Pedagang Besar Farmasi	49	51	51		
14	Apotek	704	759	745		
15	Persentase Persalinan dengan Tenaga Medis	93,4	95,1	97,2		

Sumber: Dinas Kesehatan, Sidata

b. Peluang meliputi :

1. Dukungan Pemerintah pada sektor kesehatan semakin besar.
2. Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi pra syarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan akan memiliki **multiplier effect** pada program-program

pembangunan kedepannya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Teknologi dan inovasi bidang kesehatan yang semakin berkembang.
4. Perkembangan transportasi, komunikasi dan peyebarluasan berbagai informasi.
5. Tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin tinggi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Berbagai perkembangan kebijakan, masalah dan tantangan baru di bidang kesehatan berdampak perlunya penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024–2026 agar dapat menjawab perubahan dan tantangan pembangunan kesehatan. Sebagai penyempurnaan dari Rencana Strategis 2019–2023, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur menyusun kembali Renstra tahun 2024–2026 yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa kendala antara lain :

- a. Akibat dari pembiayaan kesehatan yang masih cenderung kuratif dibandingkan pada promotif dan preventif mengakibatkan pengeluaran pembiayaan yang tidak efektif dan efisien, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan pada kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.
- b. Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum terpenuhi, utamanya di DTPK. Kualitas tenaga kesehatan juga masih rendah, pengembangan karier belum berjalan, sistem penghargaan, dan sanksi belum sebagaimana mestinya.
- c. Masalah kurangnya tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu.

- d. Cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan mengacu pada Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP), tetapi pelaksanaannya belum optimal, belum terintegrasi dengan system lainnya. Perencanaan pembangunan kesehatan antara pusat dan daerah serta provinsi dan kab/kota belum sinkron dan dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi lebih lanjut di tingkat pimpinan. Permasalahan tersebut antara lain muncul pada pembagian peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk di dalamnya adalah masalah pembiayaan khususnya untuk kegiatan dan biaya operasional, munculnya permasalahan pada harmonisasi kebijakan, masalah pada pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi dinas kesehatan dan manajemen Rumah Sakit, serta perlu komitmen pemerintah daerah untuk biaya operasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- e. Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah diterapkan kebijakan desentralisasi. Keterbatasan data menjadi kendala dalam pemetaan masalah dan penyusunan kebijakan. Pemanfaatan data belum optimal dan surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Proses desentralisasi yang belum optimal berpotensi menimbulkan masalah pada buruknya pelayanan kesehatan yang diberikan bagi masyarakat.
- f. Masyarakat masih ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan kesehatan, promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pemanfaatan dan kualitas Upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat (UKBM), seperti Posyandu dan Poskesdes masih rendah. Upaya kesehatan juga belum sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang diderita oleh masyarakat.

Dari analisa diatas, permasalahan yang dihadapi Dinas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2024-2026

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.) Status Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak belum optimal	Penyebab kematian ibu masih di dominasi oleh pendarahan (22%), Hipertensi (16%), Anemia bumil 14,45%, KEK bumil 9,2%, Pelayanan kesehatan bayi 59,2%, Pelayanan kesehatan balita 48,18% dan Meningkatnya kematian bayi (655 kematian)	Kualitas ANC (skrining pada ibu hamil) dan PNC baik pada ibu Nifas maupun bayi baru lahir yang masih belum sesuai dengan standart (SOP)
		Sistem rujukan yang belum optimal sehingga proses koordinasi antar tenaga kesehatan juga terhambat
		belum optimalnya dukungan lintas sektor dan lintas program

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>Pemenuhan sarana dan prasarana , untuk memberikan pelayanan antenatal baru mencapai sebesar 69,4% dari standar minimal yang diharapkan yaitu 75%. Dan pelayanan neonatal baru mencapai 30% dari standar minimal seharusnya 65%</p>
		<p>Masih tingginya penyebab kematian bayi karena penyakit infeksi masih tinggi (diare 67% dan pneumonia 21%)</p>
		<p>Pelaksanaan SDIDTK memerlukan waktu cukup lama, sehingga cenderung tidak dilaksanakan apabila pasien yang datang cukup banyak (manajemen waktu)</p>
	<p>Masih rendahnya Capaian Pemantauan Pertumbuhan (D/S) sebesar 44,83% (target</p>	<p>Posyandu aktif baru 36% sehingga mengakibatkan D/S masih rendah.</p>

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	<p>90%), masih ditemukan prevalensi stunting 23,9%, Prevalensi wasting 9,1 % Prevalensi underweight 20,4 % (ketiga indikator tersebut berada di atas batasan WHO), ASI Eksklusif 74,3% (Target 80%), IMD 84 %, Vitamin A 73,22 % (Target 76%), Jumlah kasus gizi buruk 236 orang</p>	<p>Puskesmas dengan 9 tenaga baru 65,43% salah satunya petugas gizi masih ada yang belum merata.</p> <p>kurangnya pemanfaatan buku KIA (Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan masih rendah)</p> <p>belum optimalnya dukungan lintas sektor dan lintas program (TPPS)</p>
		<p>kurang tersedianya alat pemeriksa antropometri sesuai standar di fasilitas kesehatan,</p>
		<p>belum optimalnya kinerja tim penanggulangan masalah Gizi di Provinsi atau Kab/Kota dalam implementasi SOP intervensi masalah gizi (Tim Pemantauan Pertumbuhan, Tatalaksanaan Gizi</p>

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Buruk, Konselor ASI, PMBA dan PAG)
		Belum semua Puskesmas memiliki tenaga kesehatan terlatih (Pemantauan Pertumbuhan, Tatalaksanaan Gizi Buruk, Konselor ASI, PMBA dan PAG)
2.) Pelayanan kesehatan usia produktif belum optimal	<p>Pelayanan Kesehatan Usia Produktif belum optimal dan belum terintegrasi, Capaian Yankes PKPR (58,51%), Pembinaan UKSM masih rendah (43,8%), Yankespro Catin (95,03%), KB Aktif baru mencapai 66,5%, Anemia Rematri : 53,27 %, Puskesmas melaksanakan aktifitas fisik 20% (Target 70%), Capaian Posyandu Aktif masih rendah (36,9%),</p>	<p>Belum semua Puskesmas memenuhi syarat sebagai Puskesmas dengan SN PKPR (Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)</p> <p>Alur pelayanan yankespro catin yang dilakukan oleh catin beragama Islam lebih jelas yaitu melalui KUA, sementara bagi yang beragama non Islam alurnya masih belum jelas</p>

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Implementasi Germas Belum Optimal (60%)	Pembinaan posyandu aktif oleh kab/kota masih rendah Aktifasi Pokjanel Posyandu Belum semua kader posyandu terlatih Kelembagaan masih belum optimal Belum tersedianya BHP deteksi dini dan aktifitas fisik di Kb/Kota
3.) Pelayanan Kesehatan Lansia belum optimal	Pelayanan Kesehatan Lansia yang terstandart baru mencapai 45,65%. Puskesmas Santun Lansia baru mencapai 61,7%, Puskesmas yang melaksanakan perawatan jangka panjang baru mencapai 38,3%, Lansia yang diberdayakan baru mencapai 5,87%	Tenaga kesehatan yang dilatih pelayanan lansia dan geriatri di fasilitas kesehatan masih kurang. Masih kurangnya sarana/prasarana yang mendukung pelayanan kesehatan lansia (lansia Kit baru mencapai 27%).

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
4.) Beban penyakit menular dan penyakit tidak menular yang masih tinggi	Penemuan Kasus penyakit menular belum mencapai target nasional 90% untuk penyakit TBC (capaian 46%) Incidence Rate DBD belum mencapai target nasional <10 / 100.000 penduduk (IR DBD 158,2 / 100.000 Penduduk).	Alat kesehatan dan logistik untuk pemeriksaan diagnostik masih kurang. Seperti alat Tes Cepat Molekular untuk pemeriksaan TB baru ada 32 unit, mikroskop di Puskesmas ada yang rusak
		Sistem pencatatan dan pelaporan penyakit menular belum maksimal. Pelaporan dari jejaring internal faskes maupun pelaporan dari faskes swasta belum berjalan baik
		aplikasi pelaporan yang belum bridging dengan sistem informasi pelayanan fakes.
		pengelola program memiliki tugas rangkap.
	Tatalaksana kasus penyakit menular yang belum mencapai target	Belum semua petugas kesehatan mendapatkan pelatihan

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	nasional	penegakan diagnosis dan tatalaksana kasus
		Penanganan kasus putus berobat belum maksimal
		Kesadaran penderita untuk secara teratur/patuh berobat masih rendah.
		Faskes masih mengalami stock out obat, seperti obat malaria, obat TB anak, obat Kusta anak, sementara Dinas Kesehatan Provinsi tidak memiliki kewenangan pengadaan obat.
		Kapasitas kader dalam melakukan pemantauan minum obat masih kurang
	Penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi masih banyak.	Belum semua Kabupaten /Kota capaian Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sesuai target dan Adanya

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		masyarakat yang anti vaksin.
	Deteksi Dini Faktor Risiko pada penduduk usia ≥ 15 tahun masih rendah 19,37% <i>(sumber_SIPTM_Kaltim Tahun 2022)</i>	Masyarakat tidak rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk Deteksi Dini Risiko PTM minimal 3 bulan sekali.
		Cakupan deteksi dini pada sasaran usia ≥ 15 tahun pemeriksaan tekanan darah : 19,2%, dengan tekanan darah tinggi : 7,7% (SIPTM)
	Faktor risiko yang didapat pada skrining deteksi dini yaitu tekanan darah (39%), IMT (26%), merokok (11%) dan gula darah (8%) <i>(sumber_SIPTM_Kaltim Tahun 2022)</i>	Pemeriksaan/deteksi risiko PTM membutuhkan reagen BHP (pemeriksaan GD) dan peralatan yang standar. Kurang pemahaman masyarakat tentang besarnya permasalahan dan beban dari PTM dan faktor risikonya

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	<p>Dari hasil skrining deteksi dini penduduk usia ≥ 15 tahun ditemukan prevalensi penyakit Hipertensi (20,7%), DM tipe 2 (5,58%) dan Obesitas (1,45%) (sumber_SIPTM_Kaltim Tahun 2022)</p>	<p>Masyarakat yang sudah diketahui menderita penyakit HT, DM dan obesitas masih kurang patuh terhadap pengobatan maupun hasil konseling.</p>
		<p>Persentase penderita HT yang dilayani sesuai standar (90%) dan persentase penderita DM yang dilayani sesuai standar baru 63% (laporan rutin)</p>
	<p>(Risesdas Kaltim, 2018) Prevalensi depresi usia > 15 th 6.1%</p>	<p>Masih kurangnya pelaporan pelayanan kesehatan jiwa dan skrining masalah kesehatan jiwa Masih dilaporkan adanya kasus pasung (ODGJ) -- Kutim dan Kubar yang berarti belum mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar. RS</p>

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Kab/Kota belum menyiapkan rawat Inap untuk pelayanan ODGJ, hanya RS rujukan RSJD Atma Husada Mahakam di Prov Yang tersedia.
5.) Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata	Pendayagunaan dan pemerataan 9 Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas belum sesuai standar (Indikator : Puskesmas lengkap 9 jenis tenaga kesehatan)	Mutasi yang begitu mudah dan cepat dari daerah terpencil/sangat terpencil, tanpa mempertimbangkan Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), dan Formasi (Kebutuhan) tenaga Kesehatan
		Insentif tenaga Kesehatan di daerah kurang menarik
		Daerah DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan) / 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tidak diminati terutama dokter

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Terbatasnya kemampuan finansial Pemerintah Daerah untuk formasi PPPK dibanding dengan formasi kebutuhan berdasarkan Analisa Beban Kerja Kesehatan (ABK Kesehatan)
		Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan terbatas untuk melakukan redistribusi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kabupaten (UU 23 /2014)
	Kab/Kota belum mencapai 90 % Pemenuhan 4 Spesialis dasar dan 3 Penunjang pada RSUD milik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	RS pengusul menolak pengembalian /pendayagunaan dokter spesialis yang telah selesai pendidikan dokter spesialis (Program Pendidikan Dokter Spesialis)
		Lokus Pendayagunaan Dokter spesialis di Kaltim tidak diminati.

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<p>RSUD Kab/Kota yang telah mengusulkan program</p> <p>Pendayagunaan Dokter Spesialis setiap tahunnya belum tentu terpilih sebagai penempatan dokter spesialis, karena insentif tidak menarik, dan lain-lain</p>
6.) Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar	Masih ada Puskesmas yang belum memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar Permenkes 75 Tahun 2014 serta Update Aspak yang belum optimal dilaksanakan	Keterbatasan anggaran di kab/kota dalam pemenuhan SPA
	Puskesmas yang belum mencapai kriteria Prasarana sesuai standar sebesar 98,4 %	Keterbatasan kemampuan SDM dalam pengisian Aplikasi ASPAK
	Puskesmas yang belum mencapai kriteria Alkes sesuai standar sebesar 87,7%	

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	c. akses dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan baru sampai di kecamatan	Geografis sulit diakses, biaya tinggi, budaya masyarakat, SDM kesehatan dan keterbatasan sarana transportasi.
	sistem pelayanan kesehatan berbasis telemedicine belum dilaksanakan di 8 kab/kota	Keterbatasan jaringan telekomunikasi/internet di daerah DTPK
	Prasarana dan alat Kesehatan di Faskes Rujukan di daerah DTPK belum memenuhi Standar	Sebaran Penduduk yang tidak merata di daerah DTPK sehingga utilisasi fasyankes rendah
	d. Belum semua Kab/Kota mempunyai Faskes yang sesuai standar mutu pelayanan	Adanya perubahan standar akreditasi bagi fasyankes primer dan fasyankes rujukan
6 kab/kota belum mempunyai minimal 1 puskesmas terakreditasi Paripurna	6 Kab/Kota yang mempunyai RS terakreditasi paripurna	
	e. Belum optimalnya pelayanan sesuai	

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	standar mutu pada UPTD Dinas Kesehatan (Labkes, RSUD Korpri, RS Mata, dan Bapelkes)	pengembangan Gedung dan pemenuhan fasilitas pendukung
	e. Kepesertaan JKN telah mencapai UHC, tetapi belum semua mencapai keaktifan kepesertaan sebesar minimal 80%	Data kepesertaan masyarakat miskin merupakan kewenangan Dinas sosial & BPJS Kesehatan NIK yang belum valid yang menjadi kewenangan DKP3A (Dukcapil)
	f. Belum semua kab/kota mempunyai puskesmas yang menjalankan layanan kesehatan tradisional sesuai standar dan mempunyai griya sehat	Pelayanan Kesehatan tradisional belum menjadi indikator kab/kota tetapi menjadi indikator provinsi (Permendagri 81/2022)
	Kekosongan obat, vaksin, dan Perbekalan kesehatan	Keterlambatan dalam pendistribusian obat dan vaksin ke daerah yg sulit dijangkau
		Keterbatasan penyediaan obat program dan vaksin oleh Pusat

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Banyak vaksin yang expire Date Dekat
	Belum seluruh Kabupaten/Kota terpenuhi alat kesehatan, kalibrasi, dan pemeliharannya	Pembinaan alat kesehatan di Kabupaten/Kota belum berjalan optimal
		Belum ada tenaga yang mengukur kelayakan alat kesehatan di Kabupaten/Kota
		belum terpenuhinya semua ruang lingkup/parameter uji kalibrasi (UPTD Labkes)
7.) Kesiapan penanggulangan krisis kesehatan dan KLB yang belum optimal	Belum optimalnya Manajemen Krisis kesehatan pada klaster kesehatan	Tenaga krisis kesehatan belum dilatih
		Belum tersedianya sarana, prasarana, alkes, obat dan perbekalan kesehatan khusus krisis kesehatan
		Rencana kontigensi krisis kesehatan belum ada

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
8) Tatalaksana Dinkes Prov Kaltim perlu penyesuaian	Perubahan kebijakan dan transisi peraturan yang sangat dinamis	Perubahan sistem kerja instansi pemerintah sesuai dengan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 terhadap nomenklatur Struktur Organisasi Tata kelola pemerintahan yang masih tidak seragam antara pusat dan daerah menyebabkan ruang gerak koordinasi yang terbatas

3.2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan kesehatan pada periode 2024-2026 adalah Pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Sasaran pokok pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020-2024 adalah: 1) Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu 2) Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan 3) Menurunnya kematian maternal dan neonatal 4) Meningkatnya status gizi balita 5) Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 6) Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor 7) Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko 8) Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat 9) Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan 10) Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar 11) Meningkatnya pembiayaan Kesehatan 12) Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah 13) Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem

informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan 14) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Berdasarkan 14 sasaran pokok tersebut yang perlu kerja keras dilakukan saat ini adalah: 1) Penyempurnaan sistem akreditasi pelayanan kesehatan 2) Kepesertaan jaminan sosial kesehatan (JKN) 3) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan 4) Percepatan penurunan stunting 5) Promosi kebudayaan hidup sehat 6) Mendorong regulasi pemerintah pusat dan daerah 7) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM serta penguatan sistem surveilans 8) Peningkatan ketahanan kesehatan nasional 9) Menjamin kecukupan obat esensial, termasuk vaksin 10) Pemenuhan tenaga kesehatan 11) Mendorong peningkatan pembiayaan Kesehatan.

a. Isu Lingkungan

Isu lingkungan yang teridentifikasi saat ini yaitu:

- Kualitas air bersih yang belum memenuhi standar di daerah DTPK/3T.
- Kualitas sanitasi lingkungan yang belum memadai di daerah DTPK/3T.
- Perubahan Iklim tropis menyebabkan perubahan pola penyakit (mis: DBD, Malaria).

b. Isu Kebijakan

Isu kebijakan ini muncul dikarenakan beberapa hal antara lain :

- Masih perlunya penyesuaian dalam hal implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Tumpang tindih pelaksanaan peraturan dari beberapa instansi terkait.
- Permasalahan manajerial dalam sinkronisasi perencanaan, kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi dan integrasi lintas sektor.

c. Isu Kelembagaan

- Masih terbatasnya regulasi kesehatan, kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan.
- Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.

d. Isu Infrastruktur

Pada kelompok infrastruktur teridentifikasi isu terkait minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan, sistem informasi kesehatan. Secara detail, isu yang teridentifikasi mencakup :

- Minimnya akses transportasi ke pelayanan kesehatan.
- Minimnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan di DTPK/3T.
- Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang sistem informasi kesehatan.
- Minimnya penyediaan sumber daya air bersih.
- Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah tertinggal dan terpencil.

e. Isu Pendanaan

- Masih cukup tingginya pembiayaan kesehatan terutama pelayanan kuratif.
- Pembiayaan daerah masih bergantung dari pusat.
- Belum optimalnya sumber-sumber dana yang berasal dari perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- Identifikasi potensi sumber dana dari Pemerintah Pusat (APBN/DAK) untuk mendukung pelaksanaan isu strategis pembangunan Kesehatan.
- Adanya dukungan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

- Identifikasi jenis-jenis pendanaan dari pemerintah pusat yang berasal dari kebijakan subsidi.
- Identifikasi dan pemanfaatan sumberdaya dari swadaya masyarakat.

Dari analisis situasi dan kecederungan di atas serta memperhatikan perkembangan dan tantangan yang terkini, maka **isu-isu strategis** yang akan dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas.
- b. Masih tingginya jumlah kematian ibu, bayi dan balita.
- c. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh.
- d. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
- e. Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar.
- f. Penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata di wilayah tertentu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026:

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”

Untuk mewujudkan tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, diambil beberapa sasaran untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, diantaranya adalah :

- Sasaran** : 1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan ibu dan anak.
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar.
3. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan. Strategi digunakan untuk mencapai pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dan kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,82	74,89	74,93
			Prevalensi Stunting	12,83	11	10
		1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan ibu dan anak	1.1. Jumlah Kematian Ibu	63	54	46
			1.2. Jumlah Kematian Bayi	547	470	404
			1.3. Persentase Balita Wasting	7,6	6,8	6
1.4. Persentase Balita Underweight	16,2	14,1	12			

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Fasilitas Kesehatan	87	87,5	88
		3. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	3.1. Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberculose (TBC)/ Success Rate (SR)	87	90	95
			3.2. Persentase penderita Diabetes Mellitus/DM yang terkendali	30	50	70
			3.3. Indeks Pencapaian SPM	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
			Kesehatan			
2	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	4. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	4.1. Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,53	71,93	72,23
	-		4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	87	87,5	88

a) Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
1.	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS 2015)	183
2.	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24 (SDKI 2017)	16
3.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGBI 2019)	14%
4.	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas 2018)	7
5.	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
6.	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report 2017)	190
7.	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	405 285 (Kemkes, 2018)	405
8.	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1 (Riskesdas 2018)	8,7
9.		21,8 (Riskesdas 2018)	21,8
10.		57,9 (Riskesdas 2018)	90

No	Indikator	Status Awal	Target 2024
11.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	40 (Kemkes, 2018)	100
12.	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	63 (Kemkes, 2018)	100
13.	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	23 (Kemkes, 2018)	83
14.	Persentase rumah sakit terakreditasi	12 (Kemkes, 2019)	0
15.	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	86 (Kemkes, 2019)	96
	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)		
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)		

Berdasarkan telaahan terhadap Renstra Kementerian Kesehatan sebagai rujukan program kegiatan SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

2. Visi Kementerian Kesehatan “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”

3. Misi Kementerian Kesehatan :

- a. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Menurunkan angka stunting pada balita;
- c. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- d. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat Kesehatan dalam negeri.

4. Tujuan Kementerian Kesehatan

Terdapat empat tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2020-2024, yaitu :

- a. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
- b. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- c. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit pengelolaan kedaruratan Kesehatan masyarakat.
- d. Peningkatan sumber daya Kesehatan.

5. Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
- b. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
- c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- d. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat Kesehatan.
- e. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
- f. Terjaminnya pembiayaan Kesehatan.
- g. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

h. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.

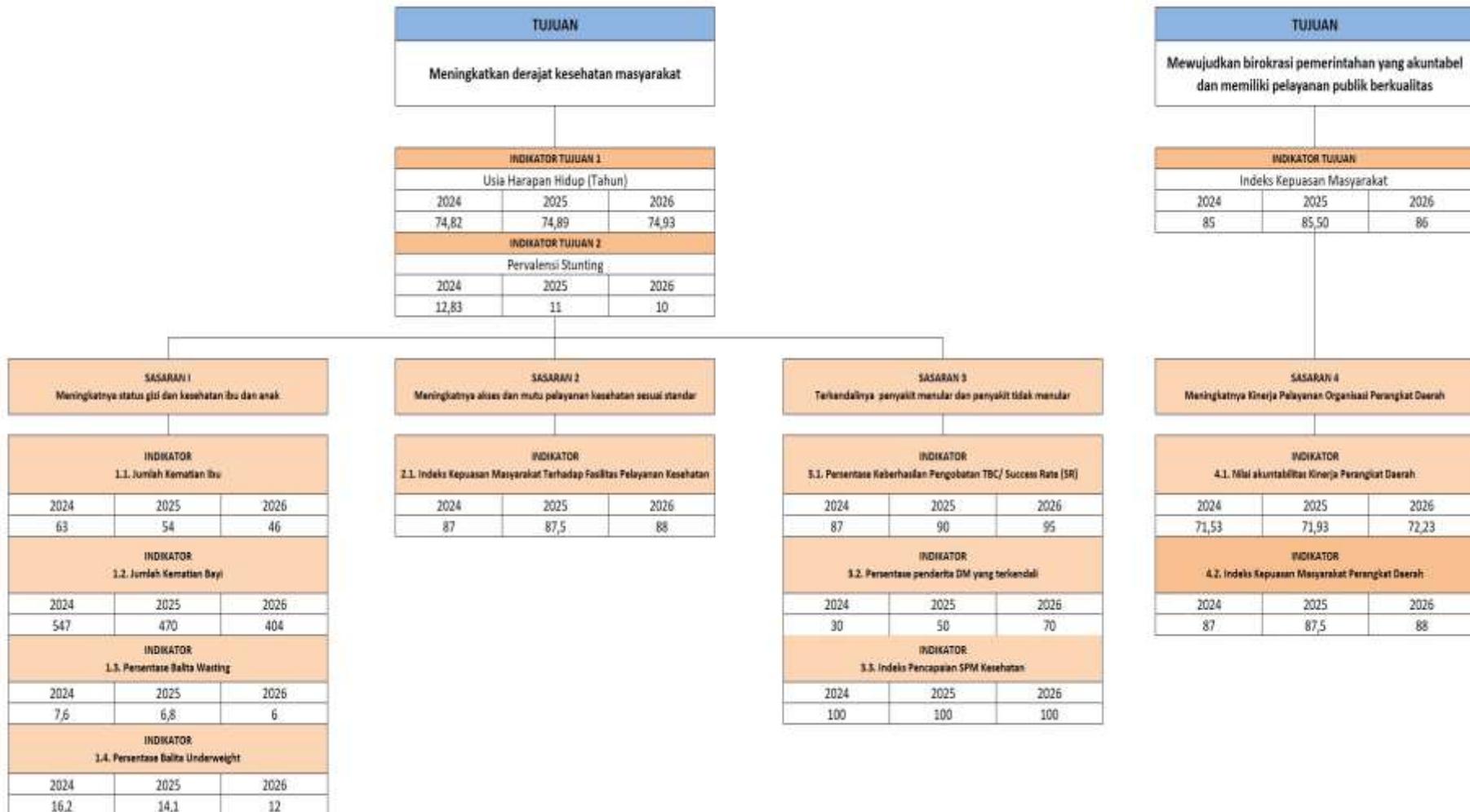
6. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan mengacu pada lima hal penting yakni:

- a. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
- b. Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif.
- c. Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan dan pengendalian penyakit.
- d. Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan didukung inovasi teknologi.
- e. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas, termasuk integrasi lintas program.

4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING RENSTRA DINAS KESEHATAN 2024-2026



PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
INDIKATOR : Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		
2024	2025	2026
60	80	100

↓

Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
INDIKATOR : Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor		
2024	2025	2026
60	80	100
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Protokol Preventif Tingkat Daerah Provinsi		
INDIKATOR : Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Protokol Preventif Tingkat Daerah		
2024	2025	2026
60	80	100

PROGRAM PERINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
INDIKATOR : Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya		
2024	2025	2026
35	45	50

↓

Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		
INDIKATOR : Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota		
2024	2025	2026
1	1	1
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
INDIKATOR : Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia kesehatan		
2024	2025	2026
2	5	9

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
INDIKATOR : Angka Keselitan		
2024	2025	2026
10,8	10,7	10,6

↓

Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
INDIKATOR : Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasarana Alat Kesehatan minimal 60%		
2024	2025	2026
10	15	20
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
INDIKATOR : Persentase Terlaksananya layanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
2024	2025	2026
100	100	100

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
INDIKATOR 1 : Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
2024	2025	2026
80	90	100
INDIKATOR 2 : Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti		
2024	2025	2026
100	100	100

↓

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
INDIKATOR : Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu		
2024	2025	2026
100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
INDIKATOR : Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu		
2024	2025	2026
100	100	100

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		
INDIKATOR : Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		
2024	2025	2026
60	80	100

PROGRAM SEDIAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
INDIKATOR : Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki Izin operasional sesuai standar		
2024	2025	2026
100	100	100
Penerbitan Pengakuan Podajong Besar Farmasi (PBF) - Cabang dan Cabang Penyulur Alat Kesehatan (PAK)		
INDIKATOR : Persentase pengawinan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan		
2024	2025	2026
100	100	100
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		
INDIKATOR : Persentase pengawinan dan pembinaan yang dibakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		
2024	2025	2026
100	100	100

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
INDIKATOR : Persentase ketepatan data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan		
2024	2025	2026
90	95	100
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
INDIKATOR : Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna		
2024	2025	2026
60	80	100

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
INDIKATOR : Persentase SEM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
2024	2025	2026
100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah		
INDIKATOR : Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2024	2025	2026
12	12	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		
INDIKATOR : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		
2024	2025	2026
100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		
INDIKATOR : Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		
2024	2025	2026
12	12	12
Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah		
INDIKATOR : Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik		
2024	2025	2026
90	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam melaksanakan peran yang dimandatkan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis tahun 2024-2026 berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam BAB III, yang dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan sebagaimana telah diuraikan dalam BAB IV. Strategi dan arah kebijakan dimaksud pada dasarnya adalah upaya sinergis untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang bergerak dalam sub sektor kesehatan.

Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Selain itu, strategi merupakan alat metode penghubung antara tujuan dan arah kebijakan organisasi sekaligus cara untuk mewujudkan sasaran dengan rancangan secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif.

Strategi untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan, yaitu kekuatan dan peluang (*Strenghts-Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat

internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program perangkat daerah maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dengan memperhatikan atau sebagai jawaban/solusi atas analisis permasalahan dan isu strategis di seputar layanan serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam mendukung peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Kalimantan Timur yang profesional, bermoral dan bertaraf internasional. Di samping itu, strategi dan arah kebijakan juga dirumuskan dengan berpedoman pada strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD, khususnya yang berhubungan dengan reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan capaian transformasi kesehatan.

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan	1. Meningkatnya status gizi dan kesehatan ibu dan anak	1.1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak	1.1.1. Meningkatkan status gizi dan pelayanann

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Masyarakat		1.2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat	kesehatan ibu dan anak dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta pemenuhan sarana, prasarana, tenaga dan peningkatan kapasitas petugas gizi dan kesehatan ibu dan anak
			1.3. Penguatan Gerakan masyarakat hidup sehat	
		2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	2.1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2.1.1. Percepatan Pemenuhan Sarana, Prasarana, Kefarmasian dan Alkes sesuai standar
				2.1.2. Percepatan akreditasi paripurna bagi fasilitas pelayanan dasar dan rujukan minimal 1 di tiap kab/kota

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				2.1.3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu di DTPK melalui telemedicine dan Pelayanan Kesehatan Bergerak
				2.1.4. Pencapaian Universal Health Coverage di seluruh kab/kota
				2.1.5. Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional diseluruh puskesmas
				2.1.6. Peningkatan pemenuhan SDM kesehatan dan kompetensi sesuai standar
				2.1.7. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah Instalasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Farmasi, Kesehatan tradisional dan kebugaran.
		3. Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular	3.1. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan ke daruratan kesehatan masyarakat	3.1.1. Penguatan sistem pencegahan dan penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular
				3.1.2. Penguatan sistem surveilans dan upaya penanggulangan penyakit berpotensi wabah/bencana
			3.2. Pemenuhan pelayanan kesehatan pada penanggulangan krisis kesehatan dan KLB	3.2.1. Pembentukan dan pelatihan tim gerak cepat (TGC).
				3.2.2. Percepatan Pemenuhan Sarana, Prasarana, Kefarmasian dan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Alkes dalam penanggulangan krisis kesehatan dan KLB
				3.2.3. Pembentukan UPTD Krisis Kesehatan
	Tujuan : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	4.1. Peningkatan Tata Kelola dan Kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	4.1.1. Peningkatan sarana, prasarana, kapasitas dan kinerja Aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6.1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu tiga tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program

dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026).

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

Tabel 6.1 (T-C.27)

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					TOTAL DINKES + UPTD			333,057,710,000.00		337,453,615,000.00		342,967,183,000.00	
					DINAS KESEHATAN			260,006,415,000.00		261,155,057,000.00		262,790,189,000.00	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	Indeks	80	67,652,415,000.00	90	67,652,415,000.00	100	67,652,415,000.00
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	%	100	1,625,000,000.00	100	1,625,000,000.00	100	1,625,000,000.00
1	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	950,000,000.00	7	950,000,000.00	7	950,000,000.00
1	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00
1	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	475,000,000.00	8	475,000,000.00	8	475,000,000.00
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	52,667,415,000.00	100	52,187,415,000.00	100	52,667,415,000.00
1	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	185	52,027,415,000.00	187	51,547,415,000.00	190	52,027,415,000.00
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	400,000,000.00	1	400,000,000.00	1	400,000,000.00
1	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00
1	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00	12	50,000,000.00
1	02	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	640,000,000.00	100	640,000,000.00	100	640,000,000.00
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	320,000,000.00	2	320,000,000.00	2	320,000,000.00
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	80	320,000,000.00	80	320,000,000.00	80	320,000,000.00
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	4,620,000,000.00	12	4,620,000,000.00	12	4,620,000,000.00
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00	1	40,000,000.00
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1,000,000,000.00	5	1,000,000,000.00	5	1,000,000,000.00
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	50,000,000.00	3	50,000,000.00	3	50,000,000.00
1	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00	12	30,000,000.00
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	3,500,000,000.00	12	3,500,000,000.00	12	3,500,000,000.00
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	20,000,000.00	100	500,000,000.00	100	20,000,000.00
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	20,000,000.00	1	500,000,000.00	0	20,000,000.00
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	7,130,000,000.00	12	7,130,000,000.00	12	7,130,000,000.00
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1,710,000,000.00	1	1,710,000,000.00	1	1,710,000,000.00
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	5,400,000,000.00	1	5,400,000,000.00	1	5,400,000,000.00
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	90	950,000,000.00	100	950,000,000.00	100	950,000,000.00
1	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	38	325,000,000.00	38	325,000,000.00	38	325,000,000.00
1	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	200,000,000.00	10	200,000,000.00	10	200,000,000.00
1	02	01	1.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	90	425,000,000.00	90	425,000,000.00	90	425,000,000.00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Angka	10,8	181,814,368,000.00	10,7	182,863,010,000.00	10,6	184,398,142,000.00
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi SPA minimal 60%	%	10	26,861,138,000.00	15	27,209,780,000.00	20	27,509,780,000.00
1	02	02	1.01	06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak. Gugus Pulau. Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine . dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	3	1,685,100,000.00	4	1,685,100,000.00	5	1,685,100,000.00
1	02	02	1.01	04	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1	4,000,000,000.00	1	4,139,456,800.00	1	4,259,456,800.00
1	02	02	1.01	07	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	Unit	20	600,000,000.00	22	600,000,000.00	24	600,000,000.00
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang disediakan	Unit	1	6,000,000,000.00	1	6,209,185,200.00	1	6,389,185,200.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	26	516,000,000.00	28	516,000,000.00	30	516,000,000.00
1	02	02	1.01	20	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan <i>Telemedicine</i> untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	6	842,550,000.00	8	842,550,000.00	10	842,550,000.00
1	02	02	1.01	25	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	2	2,729,154,000.00	2	2,729,154,000.00	2	2,729,154,000.00
1	02	02	1.01	27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	10,488,334,000.00	1	10,488,334,000.00	1	10,488,334,000.00
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	100	148,447,930,000.00	100	150,058,990,000.00	100	150,794,122,000.00
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	#####	1,000,000,000.00	#####	1,000,000,000.00	2,096,543	1,000,000,000.00
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	185	4,000,000,000.00	200	4,000,000,000.00	225	4,000,000,000.00
1	02	02	1.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	6,500,000,000.00	1	6,650,000,000.00	1	6,700,000,000.00
1	02	02	1.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	3,500,000,000.00	1	4,000,000,000.00	1	4,050,000,000.00
1	02	02	1.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	3,117,000,000.00	1	2,617,000,000.00	1	2,667,000,000.00
1	02	02	1.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1	10,870,200,000.00	1	11,020,200,000.00	1	11,170,200,000.00
1	02	02	1.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	2,246,800,000.00	1	2,246,800,000.00	1	2,246,800,000.00
1	02	02	1.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	2,246,800,000.00	1	2,246,800,000.00	1	2,246,800,000.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						
URUSAN/UNSUB	UR	BIDANG URUSAN/BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN				SUB KEGIATAN	2024		2025		2026	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	1	1,348,080,000.00	1	1,348,080,000.00	1	1,348,080,000.00	
1	02	02	1.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	5	5,055,300,000.00	6	5,560,830,000.00	7	5,560,830,000.00	
1	02	02	1.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	2	25,101,000,000.00	2	25,401,000,000.00	2	25,701,000,000.00	
1	02	02	1.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	750,000,000.00	1	750,000,000.00	1	750,000,000.00	
1	02	02	1.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	1	2,000,000,000.00	
1	02	02	1.02	16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	75,000,000,000.00	1	75,000,000,000.00	1	75,135,132,000.00	
1	02	02	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	700,000,000.00	1	700,000,000.00	1	700,000,000.00	
1	02	02	1.02	19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	3,370,200,000.00	1	3,875,730,000.00	1	3,875,730,000.00	
1	02	02	1.02	21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	2	700,000,000.00	2	700,000,000.00	2	700,000,000.00	
1	02	02	1.02	23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	3	842,550,000.00	4	842,550,000.00	5	842,550,000.00	
1	02	02	1.02	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	10	100,000,000.00	10	100,000,000.00	10	100,000,000.00	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	%	90	1,450,000,000.00	95	1,550,000,000.00	100	2,050,000,000.00	
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1,450,000,000.00	1	1,550,000,000.00	1	2,050,000,000.00	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	Persen	60	5,055,300,000.00	80	4,044,240,000.00	100	4,044,240,000.00	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan. Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	1	1,685,100,000.00	2	1,516,590,000.00	2	1,516,590,000.00
1	02	02	1.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	5	1,685,100,000.00	5	1,516,590,000.00	5	1,516,590,000.00
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	20	1,685,100,000.00	25	1,011,060,000.00	30	1,011,060,000.00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	35	7,425,500,000.00	45	7,525,500,000.00	50	7,625,500,000.00
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Provinsi dan Kab/Kota	Dokumen	1	1,341,924,000.00	1	1,341,924,000.00	1	1,341,924,000.00
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	1,610	1,341,924,000.00	1,620	1,341,924,000.00	1630	1,341,924,000.00
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	Kab/Kota	2	6,083,576,000.00	5	6,183,576,000.00	9	6,283,576,000.00
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	600	5,700,526,000	1000	5,800,526,000	1500	5,900,526,000
1	02	03	1.02	02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	383,050,000	1	383,050,000	1	383,050,000
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar	%	100	1,092,012,000.00	100	1,092,012,000.00	100	1,092,012,000.00
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	%	100	798,080,000.00	100	798,080,000.00	100	798,080,000.00
1	02	04	1.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	55	798,080,000.00	60	798,080,000.00	64	798,080,000.00

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	%	100	293,932,000.00	100	293,932,000.00	100	293,932,000.00
1	02	04	1.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	3	293,932,000.00	3	293,932,000.00	3	293,932,000.00
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	%	60	2,022,120,000.00	80	2,022,120,000.00	100	2,022,120,000.00
1	02	05	1.01		Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	Persen	60	404,424,000.00	80	404,424,000.00	100	404,424,000.00
1	02	05	1.01	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan Penggalangan Kemitraan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan. Pemberdayaan. Penggalangan Kemitraan. Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1	404,424,000.00	1	404,424,000.00	1	404,424,000.00
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persentase	60	1,011,060,000.00	80	1,011,060,000.00	100	1,011,060,000.00
1	02	05	1.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	505,530,000.00	1	505,530,000.00	1	505,530,000.00
1	02	05	1.02	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	505,530,000.00	1	505,530,000.00	1	505,530,000.00
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persen	60	606,636,000.00	80	606,636,000.00	100	606,636,000.00
1	02	05	1.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1	606,636,000.00	1	606,636,000.00	1	606,636,000.00
					UTPD BALAI PELATIHAN KESEHATAN				9,159,395,000		9,282,892,000		9,682,892,000
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	8,659,395,000	90	8,682,892,000	100	9,082,892,000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100	104,400,000	100	134,640,000	100	134,640,000
1	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	-	-	-	-	-	-
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	104,400,000	12	134,640,000	12	134,640,000
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	100	613,560,000	100	613,560,000	100	941,349,800
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3	192,800,000	3	192,800,000	3	265,000,000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	112	420,760,000	112	420,760,000	125	676,349,800
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	3,135,125,000	12	3,074,008,200	12	3,350,990,200
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	55,382,800	10	60,921,000	10	62,000,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	1,430,504,450	10	1,370,505,200	10	1,400,000,000
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	552,655,000	3	460,000,000	3	560,000,000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	-	1	-	1	-
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	234,097,000	1	284,097,000	1	428,990,200
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	862,485,750	12	898,485,000	12	900,000,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	61,672,000	100	130,000,000	0	20,000,000
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1,000,000	0	-	-	0
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	60,672,000	2	130,000,000	-	20,000,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2,937,000,000	12	3,025,810,000	12	2,695,912,000
1	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12,000,000	12	14,000,000	12	14,000,000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	850,000,000	12	936,810,000	12	936,810,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2,075,000,000	12	2,075,000,000	12	2,282,500,000
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	%	98%	1,807,638,000	98%	1,704,873,800	98%	1,940,000,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	65,000,000	14	70,000,000	14	70,000,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	220	166,969,000	220	166,969,000	230	170,000,000
1	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	24	1,575,669,000	24	1,467,904,800	24	1,700,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	35	500,000,000	45	600,000,000	50	600,000,000
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pelatihan bagi tenaga kesehatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun	%	95%	500,000,000	95%	600,000,000	95%	600,000,000
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM	Jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	90	500,000,000	120	600,000,000	120	600,000,000
					Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim				28,311,925,000		29,437,842,000.00		30,566,278,000.00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	21,811,925,000	90	22,248,163,500	100%	22,693,126,770
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100		100%		100%	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	%	100%	839,214,624	100%	5,662,829,048	100%	5,776,085,629
1	02	01	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	839,214,624	12	5,662,829,048	12	5,776,085,629
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persen	98%	1,490,943,000	98%	1,520,761,860	98%	1,551,177,097
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	390	1,490,943,000	410	1,520,761,860	440	1,551,177,097
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit	%	12	6,122,642,216	12	6,245,095,060	12	6,369,996,962

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	7	93,111,200	10	94,973,424	13	96,872,892
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jenis	24	4,829,531,016	29	4,926,121,636	35	5,024,644,070
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	1,200,000,000	36	1,224,000,000	36	1,248,480,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%	300,000,000	100%	306,000,000	100%	312,120,000
1	2	1	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	150,000,000	3	153,000,000	3	156,060,000
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jenis	5	150,000,000	7	153,000,000	9	156,060,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	8,541,392,160	100	1,547,965,872	100	1,578,925,189
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	1,517,613,600	12	773,982,936	12	789,462,594.00
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	7,023,778,560	12	773,982,936	12	789,462,595.00
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	Persen	100%	517,733,000	100%	2,885,511,660	100%	2,943,221,893
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	272,413,000	10	1,442,755,830	12	1,471,610,947
1	02	1	1.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	Jenis	150	245,320,000	175	1,442,755,830	200	1,471,610,946
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Persen	98%	4,000,000,000	98%	4,080,000,000	98%	4,161,600,000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	3	4,000,000,000	3	4,080,000,000	3	4,161,600,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah Provinsi	Persen	98%	6,420,000,000	98%	7,008,078,500	98%	7,689,919,230

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persen	98%	6,420,000,000	98%	7,008,078,500	98%	7,689,919,230
1	02	02	1.01	1	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1	500,000,000	1	410,000,000	1	420,200,000
1	02	02	1.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit	2	1,000,000,000	3	1,020,000,000	2	1,040,400,000
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	2	4,652,998,300	2	5,305,736,766	2	5,951,530,661
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	70	267,001,700	80	272,341,734	100	277,788,569
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	40	80,000,000	50	181,600,000.00	60	183,232,000.00
1	02	03	1.02	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Kesehatan Meningkat	Orang	90	80,000,000	120	181,600,000.00	120	183,232,000.00
					UTPD Laboratorium Kesehatan				11,089,751,000.00		11,902,600,000.00		12,652,600,000.00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	80	10,516,142,480	90	11,076,142,480	100	11,636,142,480
						Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	%	100		100		100	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahn Daerah	Bulan	12	3,516,142,480	12	3,576,142,480	12	3,636,142,480
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	960,000,000	12	1,020,000,000	12	1,080,000,000
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	24	2,556,142,480	24	2,556,142,480	24	2,556,142,480

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Terpenuhinya Layanan BLUD Sesuai Standar	%	100	7,000,000,000	100	7,500,000,000	100	8,000,000,000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	7,000,000,000	1	7,500,000,000	1	8,000,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	Angka	10,8	573,608,520	10,7	826,457,520	10,6	1,016,457,520
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan. Sarana. Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKM Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	Bulan	12	573,608,520	12	826,457,520	12	1,016,457,520
1	02	02	1.01	02	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	150	173,608,520	150	226,457,520	150	116,457,520
1	02	02	1.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Jumlah Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan yang Disediakan dan Dipelihara	Unit	8	400,000,000	8	600,000,000	8	900,000,000
					UPTD RSUD KORPRI				24,490,224,000.00		25,675,224,000.00		27,275,224,000.00
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI) Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)	Indeks	80 100	14,592,275,335	90	15,273,275,335	100	14,792,275,335
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RSUD KORPRI)	Persen	100	132,120,000	100	126,720,000	100	126,720,000
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	72	132,120,000	0	-	0	-
1	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	-	12	126,720,000.00	12	126,720,000.00
			1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi pengamanan barang milik daerah SKPD	%	100	738,600,000	0	-	0	-

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
				02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	12	738,600,000	0	-	0	-
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RSUD KORPRI)	%	100	945,976,865	100	1,955,000,000	100	2,056,000,000
1	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	150	101,305,000	150	155,000,000	150	156,000,000
1	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	100	844,671,865	100	1,800,000,000	100	1,900,000,000
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	%	100	3,432,147,510	100	2,246,106,010	100	2,262,854,410
1	02	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	30	24,182,500	35	40,000,000	45	42,000,000
1	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	309,854,410	2	309,854,410	2	309,854,410
1	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	76,000,000	4	76,000,000	4	76,000,000
1	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	456,426,600	4	456,426,600	4	460,000,000
1	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	221,854,000	5	223,000,000	5	225,000,000
1	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	250	2,343,830,000	12	1,140,825,000	12	1,150,000,000
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah (RSUD KORPRI)	%	100	700,000,000	100	650,000,000	100	400,000,000
1	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	150,000,000	1	-	1	-
1	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	150,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	400,000,000	5	500,000,000	10	250,000,000
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	%	100	5,113,430,960	100	5,400,449,325	100	3,451,700,925
1	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72	723,730,800	12	723,730,800	12	723,730,800
1	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	29	4,389,700,160	12	4,676,718,525	12	2,727,970,125
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	%	100	395,000,000	100	395,000,000	100	395,000,000
1	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	250,000,000	13	250,000,000	13	250,000,000
1	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	100	145,000,000	150	145,000,000	175	145,000,000
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	%	80	3,135,000,000	85	4,500,000,000	90	6,100,000,000
1	02	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	25	3,135,000,000	1	4,500,000,000	1	6,100,000,000
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (RSUD KORPRI)	%	75	6,837,948,665	80	6,837,948,665	100	7,928,948,665
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	%	90	6,042,948,665	90	6,042,948,665	90	7,073,948,665
1	02	02	1.01	10	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	200	2,379,904,965	300	2,453,702,665	400	2,654,702,665

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	02	1.01	17	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	150	117,537,700	200	170,000,000	250	120,000,000
1	02	02	1.01	26	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2	1,000,000,000	2	1,000,000,000	2	1,500,000,000
1	02	02	1.01	27	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	4	2,150,000,000	4	2,419,246,000	4	2,799,246,000
			1.01	14	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	Paket	4	259,246,000	0	-	0	-
				18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dipelihara	Unit	300	136,260,000	0	-	0	-
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	%	100	580,000,000	100	580,000,000	100	640,000,000
1	02	02	1.02	09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	80	300,000,000	12	300,000,000	12	350,000,000
1	02	02	1.02	22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	75	280,000,000	12	280,000,000	12	290,000,000
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	%	95	215,000,000	95	215,000,000	95	215,000,000
1	02	02	1.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	5	215,000,000	12	215,000,000	12	215,000,000
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	80	3,060,000,000		3,564,000,000		4,554,000,000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					
URUSAN/UNS UR	BIDANG URUSAN/ BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Persen	100	3,060,000,000		3,564,000,000		4,554,000,000
1	02	03	1.01	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	23	3,060,000,000		3,564,000,000		4,554,000,000

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran program dan kegiatan berjalan dengan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan, yaitu untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Kesehatan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam tiga

tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai perencana sekaligus penyelenggaraan pembangunan kesehatan daerah. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.1 (T-C.28)

**Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
(RPD)**

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
Usia Harapan Hidup / UHH (%)	74,62	74,82	74,89	74,93	74,93
Prevalensi Stunting	23,9	12,83	11	10	10
Jumlah Kematian Ibu	73	63	54	46	46
Jumlah Kematian Bayi	636	547	470	404	404
Persentase Balita Wasting	9,1	7,6	6,8	6	6
Persentase Balita Underweight	20,4	16,2	14,1	12	12
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rujukan	86,8	87	87,5	88	88

Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
Persentase Keberhasilan Pengobatan Tuberculose (TBC)/Succes Rate (SR)	86	87	90	95	95
Persentase penderita Diabetes Mellitus yang terkendali	10	30	50	70	70
Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (SPM)	100	100	100	100	100
Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	70,73	71,53	71,93	72,23	72,23
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,8	87	87,5	88	88

Tabel 7.2 (T-C.28)

**Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

Indikator Kinerja Kunci Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2024	2025	2026	
Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	100	100	100	100	100
Rasio Daya Tampung Rumah	1,78	1,78	1,79	1,8	1,8

Indikator Kinerja Kunci Program	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
Sakit Rujukan					
Persentase pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan dalam pelaksanaan program-program kesehatan yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan kesehatan. Peningkatan peran serta dan potensi swasta untuk menggalang pembangunan kesehatan agar dapat berhasil guna perlu dimaksimalkan, kemitraan yang setara, terbuka dan saling menguntungkan dapat membantu mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi yang ada.

Terwujudnya pembangunan kesehatan juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan melainkan juga menjadi tanggungjawab berbagai sektor terkait. Pembiayaan pembangunan kesehatan merupakan *public good* yang menjadi tanggungjawab pemerintah, termasuk pembangunan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan dengan mekanisme asuransi sosial yang pada waktunya dapat mencapai *universal coverage*.

Sistem kesehatan akan berfungsi secara optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat termasuk swasta, yang tidak semata-mata hanya sebagai sasaran pembangunan kesehatan melainkan juga sebagai subjek/penyelenggara pada pelaku pembangunan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan pada hakikatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan itu sendiri.

Sistem manajemen dan informasi kesehatan diselenggarakan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan guna menghasilkan informasi kesehatan yang dibutuhkan pemerintah dalam pengambilan kebijakan sektor kesehatan dan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai mampu menunjang pelayanan kesehatan secara paripurna.

Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 3 tahun.

Pada akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya,

semoga target Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai.

Samarinda, 22 Mei 2023

Kepala Dinas,



Dr. dr. H. Jaya Muallimin, Sp.KJ., M.Kes., MARS

Pembina Tingkat I

NIP. 19710720 200604 1 002

RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009